



YAYASAN
PLANET
INDONESIA

2024

LAPORAN TAHUNAN 2023

LAPORAN TAHUNAN 2023

Yayasan Planet Indonesia

 www.planetindonesia.org

Pemimpin Produksi: Rodiansyah

Penulis: Agung Nur Haq, Agung Suhartarto, Hanna A. Runtu, Helmy A. Wurlianty, Lia Syafitri, Lusianus Agato R., Naomi Siauta, Rodiansyah, Rynal May Fadli, Sugiman Karya Redja

Reviewer: Adam Miller, Devya Widhiyanti, Lia Syafitri, Miftah Zam Achid, Novia Sagita, Rodiansyah

Editor: Hairul Rohim, Hendra Budaya H., Lia Syafitri, Rodiansyah, Putri Damatashia L. P.

Desain dan Tata Letak: Lia Syafitri, Roni Bia Santo

Diterbitkan oleh

Yayasan Planet Indonesia, Februari 2024

Setiap produksi secara penuh atau sebagian harus menyebutkan judul dan kredit penerbit yang disebutkan di atas sebagai pemilik hak cipta.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENGANTAR	3
TENTANG YAYASAN PLANET INDONESIA	4
WILAYAH KERJA	6
PENGANTAR PROGRAM	9
CAPAIAN	15
TANTANGAN	49
LAMPIRAN	51
UCAPAN TERIMA KASIH	56



Pertanian Berkelanjutan di Dusun Dawar,
Kabupaten Bengkayang
© Yayasan Planet Indonesia/Roni Bia Santo

PENGANTAR

Laporan Tahunan 2023 merupakan upaya kami untuk merangkum pencapaian yang telah dicapai dalam kerja-kerja Yayasan Planet Indonesia (YPI) selama tahun 2023. Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, kami telah aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pendampingan kepada Badan Tata Kelola Lokal (BTKL), menjalin kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau lembaga lainnya di luar Provinsi Kalimantan Barat, serta menjalin kerja sama erat dengan pemerintah terkait. Kami berfokus pada konservasi spesies penting di Kalimantan Barat dan pemberdayaan masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan dalam upaya memberikan dampak positif yang signifikan.

Tahun 2023 menjadi momentum penting, dimana kami telah mengidentifikasi dan memilih empat wilayah besar sebagai fokus utama intervensi program kami. Dua di antaranya adalah kawasan konservasi alam yang dibangun melalui kerjasama intensif dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat. Kolaborasi lainnya dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Barat. Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat mencapai hasil positif dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Laporan ini membahas beberapa pencapaian dari aktivitas yang telah dilaksanakan, termasuk dampak positif yang telah dihasilkan. Kami percaya bahwa transparansi adalah kunci keberlanjutan, dan dengan menyediakan laporan ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mitra kerja dan penerima manfaat mengenai upaya dan komitmen kami terkait upaya pelestarian alam melalui kerja-kerja konservasi dan pemberdayaan masyarakat.

Laporan ini tidak hanya merupakan kewajiban, namun juga tanggung jawab kami untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil memberikan manfaat maksimal bagi lingkungan dan masyarakat. Semua informasi dalam laporan ini dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki kepentingan dalam upaya pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) berkelanjutan, dan kami berharap informasi tersebut dapat memberikan inspirasi dan dukungan bagi upaya serupa di masa mendatang.



TENTANG YAYASAN PLANET INDONESIA

Yayasan Planet Indonesia (YPI) adalah organisasi non-pemerintah internasional yang melestarikan ekosistem berisiko melalui kemitraan tingkat masyarakat. Berbadan Hukum No. 45 Tahun 2020 dan pengesahan AHU-0009840.AH.01.12.Tahun 2020.

Pendekatan holistik kami menggunakan solusi dan nilai lokal dalam meningkatkan potensi masyarakat pedesaan dan desa, serta memulihkan dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Pendekatan ini bersifat kolaboratif dan dipimpin oleh masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan SDA yang baik.

VISI

Terwujudnya hubungan antara manusia dan alam untuk sistem sosial-ekologi-ekonomi yang berkeadilan.

MISI

Melestarikan ekosistem yang rentan melalui pendekatan tata kelola yang dipimpin oleh masyarakat untuk mengintegrasikan konservasi sumberdaya alam dengan pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat.

MODEL INTI

Menciptakan dan mendukung lembaga tata kelola yang dipimpin masyarakat (Badan Tata Kelola Terkait-BTKT) sebagai mekanisme untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang inklusif di seluruh masalah ekonomi, sosial dan ekologi.

Empat pilar model inti dirancang untuk membawa perubahan positif pada sistem sosial ekologi dengan mengatasi penyebab sosial yang mendasari hilangnya keanekaragaman hayati dan eksploitasi sumberdaya yang tidak berkelanjutan.



AKSES DAN HAK

Mendukung masyarakat mendapatkan akses dan hak terhadap sumberdaya yang merupakan hal terpenting bagi kehidupan masyarakat pedesaan



TATA KELOLA

Menciptakan dan mendukung kelompok di tingkat masyarakat yang bertindak sebagai badan tata kelola atas sistem ekologi-sosial



PENGELOLAAN

Menyediakan dukungan teknis dan insentif untuk mendukung pengelolaan yang dipimpin masyarakat



REGENERASI

Menyediakan layanan sosial-lingkungan untuk memperkuat mata pencaharian alternatif dan mempertahankan kesejahteraan

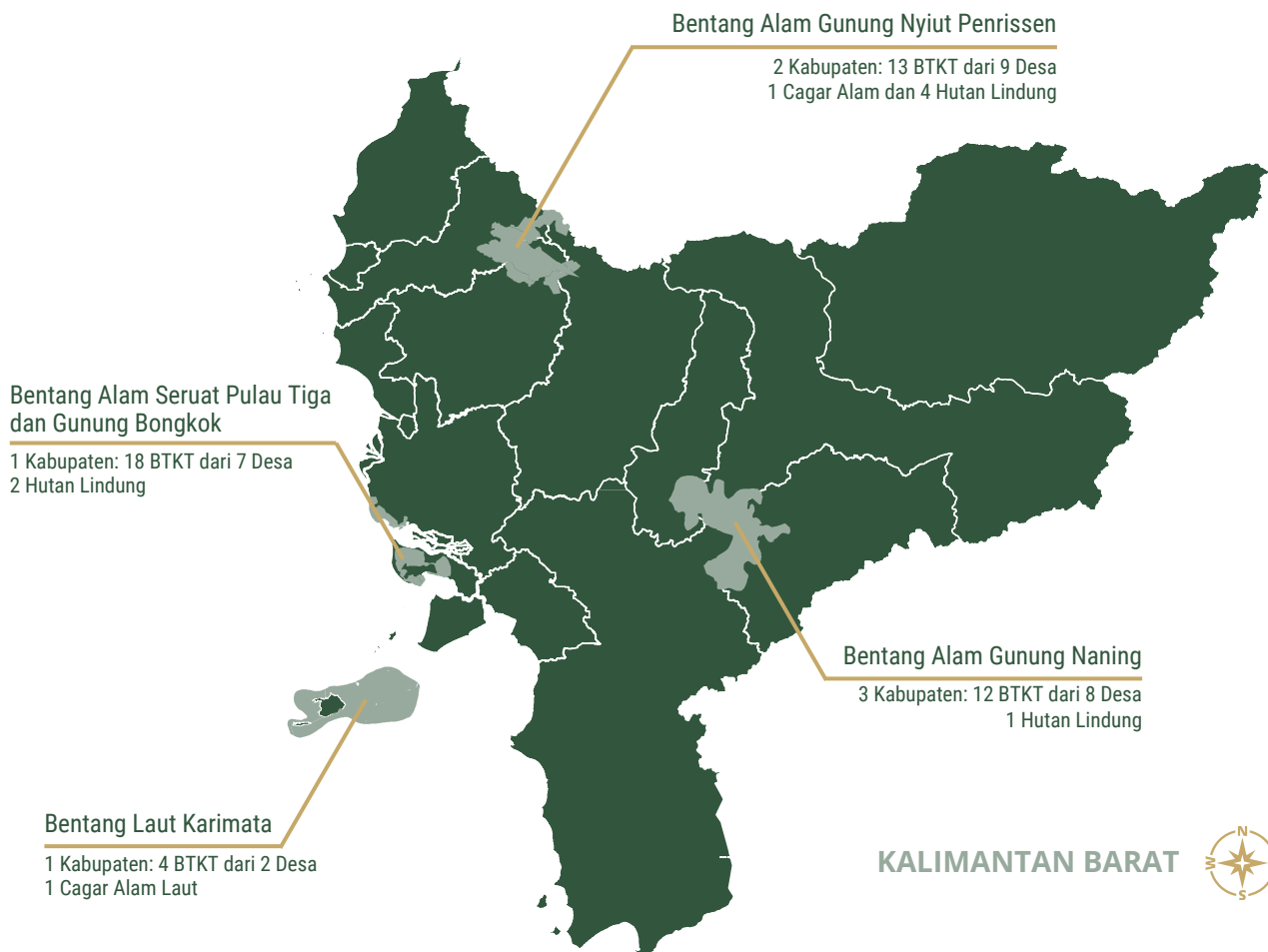
PENDEKATAN PUMK

Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi (PUMK) merupakan model pendekatan yang dirancang dan dikembangkan oleh YPI untuk membawa perubahan positif pada sistem sosial-ekologi dengan mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan meningkatkan peluang ekonomi dan akses layanan dasar bagi masyarakat lokal yang tinggal di dalam/sekitar kawasan dan ekosistem keanekaragaman hayati yang berharga.

Penerapan 4 pilar model inti YPI dilakukan melalui pendekatan PUMK, sebagai badan tata kelola yang dipimpin secara aktif oleh masyarakat, dalam mengintegrasikan konservasi sumberdaya alam dengan pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi masyarakat. PUMK merupakan kelompok swadaya masyarakat untuk membangun kesejahteraan yang berbasis lingkungan, yakni perkumpulan orang-orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial-ekonomi dengan memperhatikan aspek konservasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, dengan prinsip dari, oleh, untuk anggota. PUMK dan BTKT adalah badan tata kelola di tingkat desa yang mendorong adopsi tindakan konservasi oleh masyarakat.



WILAYAH KERJA



In-Situ

Kami terlibat aktif dalam upaya pelestarian di empat wilayah strategis, yang terbagi menjadi dua wilayah pesisir, yaitu Cagar Alam Laut (CAL) Kepulauan Karimata dan Hutan Lindung Kubu Raya (Seruat Pulau Tiga dan Gunung Bongkok), serta dua wilayah terestrial, yakni Cagar Alam Gunung Nyiut (CAGN) dan Hutan Lindung Gunung Naning (HLGN). Melalui perjanjian kerja sama yang telah terbentuk dengan pemerintah desa, kami melakukan intervensi yang signifikan melalui BTKL formal, seperti Lembaga Desa Pengelola Hutan (LDPH) dan semi formal seperti PUMK. Dengan pendekatan ini, kami bertujuan memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pelestarian alam serta memberdayakan mereka untuk turut serta dalam kegiatan konservasi di lingkungan sekitar mereka.

Ek-Situ

Ruang lingkup kerja konservasi ek-situ berada pada seluruh kabupaten di Kalimantan Barat, dimana dilakukan pemantauan terhadap aktivitas *Illegal Wildlife Trade* (IWT)/Perdagangan Ilegal Satwa Liar, menerima satwa pasca penindakan IWT khususnya burung berkicau, dan melaksanakan kampanye untuk mengubah perilaku terkait peredaran satwa liar di masyarakat. Kami juga menetapkan wilayah-wilayah kunci yang strategis, terutama di Pontianak dan empat wilayah perbatasan resmi Indonesia-Sarawak (Malaysia), sebagai fokus utama untuk memperkuat upaya penanggulangan peredaran ilegal satwa.



Kemitraan

Kami telah mengambil langkah penskalaan yang signifikan dengan menjalin kemitraan di beberapa provinsi di luar Kalimantan Barat. Saat ini, YPI telah menjalin kerja sama yang erat dengan lima mitra utama, masing-masing AKAR Foundation dari Bengkulu, Juang Laut Lestari (JARI) dari Mataram - Nusa Tenggara Barat, Yayasan Tananua Flores dari Ende - Nusa Tenggara Timur, Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) dari Gorontalo, serta Tolitoli Labengki Giant Clam Conservation (TLGC) dari Kendari - Sulawesi Tenggara. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperluas jaringan kerja kami, memperkaya pengetahuan, serta memungkinkan pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam upaya pelestarian alam di berbagai wilayah di Indonesia.



*Ikan Badut/Clown Fish
Salah satu keanekaragaman hayati laut di CAL Kepulauan Karimata
© Planet Indonesia/Justin Grubb*

PENGANTAR PROGRAM

Pengorganisasian

Program Pengorganisasian dibangun sebagai inisiatif untuk mendukung kebutuhan BTKT yang ada atau didirikan di desa-desa yang menjadi mitra YPI. Saat ini, YPI telah memandu dua model BTKT, yaitu Kelompok PUMK dan Kelompok LDPH. Untuk LDPH, dijalankan melalui skema Perhutanan Sosial (PS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Fasilitasi BTKT ini terfokus pada pembentukan lembaga tata kelola, penguatan kapasitas pengurus dan anggota, manajemen tata kelola, serta upaya menuju kemandirian BTKT. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan kepada badan tata kelola dalam melaksanakan pengelolaan organisasi secara komprehensif, sehingga mampu mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi dengan efektif.

Dana Ketahanan

Program Dana Ketahanan adalah suatu program yang berfokus membangun ketahanan ekonomi kelompok dan individu secara gotong royong. Bersama membangun permodalan kelompok yang manfaatnya dapat digunakan secara individu maupun kelompok. Kegiatan yang berjalan antara lain iuran dana partisipatif, simpanan, pinjaman individu, dan pinjaman kelompok usaha. Melalui pendekatan PUMK, harapannya BTKT mampu mengelola keuangan kelompok dan membantu masyarakat mendapatkan kemudahan untuk mengakses permodalan dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SMART Patrol

Program SMART Patrol dibangun atas dasar kesadaran akan pentingnya informasi yang akurat terkait lokasi, waktu, dan keterangan lainnya atas suatu temuan di lapangan, baik potensi maupun ancaman. Peranan penting Program SMART Patrol yaitu dalam hal melindungi dan menjaga sumberdaya alam hayati beserta ekosistemnya. Pendekatan yang dilakukan yaitu melakukan monitoring/pemantauan dan pengamanan kawasan berbasis SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*) yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk melindungi dan mengelola suatu kawasan dari berbagai ancaman, termasuk perlindungan dan pelestarian jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar dengan status dilindungi, baik secara nasional maupun internasional.

Perikanan Berkelanjutan

Program Perikanan Berkelanjutan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir, dimana masyarakat memanfaatkan sumberdaya perikanan sebagai salah satu mata pencaharian utama, termasuk keberadaan spesies penting terancam punah yang harus dilindungi. Program Perikanan Berkelanjutan hadir dengan beberapa pendekatan seperti monitoring potensi sumberdaya perikanan, monitoring penyu, dan pendampingan masyarakat, bagaimana membantu masyarakat dan para pengelola di tingkat desa untuk dapat membuat suatu Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam Adaptif (RPSDAA). Diharapkan melalui pengembangan dan penguatan program perikanan dan kelautan ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjaga ekosistem dan keanekaragaman hayati kawasan laut dan pesisir.

Keluarga Sehat

Program Keluarga Sehat (KS) merupakan program yang memberikan bimbingan dan pelatihan keterampilan tentang penanganan masalah kesehatan masyarakat, sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam mengelola SDA. Program KS diharapkan dapat mengatasi tantangan multi-dimensi yang dihadapi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan/atau ketergantungan pada SDA, dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan. Dengan masyarakat yang sehat dan berdaya, maka masyarakat diharapkan mampu mengelola SDA secara bijaksana dan tanpa merusak, serta diharapkan masyarakat sehat secara fisik, mental maupun sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial-ekonomi. Dalam pelaksanaannya, Program KS menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender dengan pembentukan dan pendampingan Kader Keluarga Sehat (Kader KS) dengan peran aktif pemangku kepentingan.

Literasi

Keterbatasan kemampuan dalam mengakses pengetahuan, keterampilan, dan ekonomi yang mengakibatkan rendahnya kesejahteraan masyarakat disebabkan salah satunya adalah rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM), yang ditunjukkan dengan adanya angka putus sekolah tinggi, angka buta aksara, jangkauan akses pendidikan di pedesaan yang jauh dan kurang layak, terutama pada kawasan-kawasan konservasi/lindung. YPI berupaya memfasilitasi masyarakat di sekitar kawasan konservasi melalui pemberdayaan masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitas pendidikan keluarga dengan Program Literasi. Program Literasi berfokus pada pendidikan non formal, untuk memfasilitasi kegiatan Keaksaraan Dasar bagi masyarakat yang masih terbatas kemampuan baca tulis dan hitung, dan Pendidikan Kesetaraan (Paket) untuk masyarakat yang putus sekolah. Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Program Literasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan SDM, peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kelulusan peserta literasi melalui Paket A, B, C dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Climate Smart Agriculture (CSA)

CSA merupakan program yang berorientasi pada pengelolaan SDA dalam memanfaatkan sumberdaya di tingkat masyarakat di bidang pertanian. Melalui Petani Penggerak lokal yang telah dilatih, kami berfokus kepada peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan pertanian, *demonstration plot* (demplot), sistem budidaya pertanian berkelanjutan, dan pemasaran produk serta penanaman pohon buah (agroforestri). Secara umum hal yang diharapkan dari upaya di atas adalah adanya efisiensi penggunaan lahan, peningkatan pendapatan petani, mengurangi pembakaran lahan dan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis, meningkatkan tutupan lahan, dan untuk meningkatkan hasil panen. Pengelolaan sistem pertanian yang tidak baik tentu akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem.

Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial (PS) merupakan skema pemberian izin pengelolaan kawasan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Mengingat keterbatasan masyarakat desa saat ini, Program Perhutanan Sosial hadir untuk membantu dalam proses pengajuan wilayah Hutan Desa (HD) bersama masyarakat. Setelah Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (SKHD) dikeluarkan, badan tata kelola LDPH akan didampingi melalui berbagai pendekatan berupa penguatan kapasitas dan kelembagaan, usaha kelompok, dan pengamanan kawasan hutan. Tidak menutup kemungkinan program ini akan dapat memfasilitasi proses pengajuan skema Perhutanan Sosial lainnya juga dan menyediakan pembiayaan jangka panjang untuk mendukung kegiatan pada badan tata kelola tersebut. Sejalan dengan tujuan besar Perhutanan Sosial, pendampingan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kesimbangan lingkungan, dan mendukung dinamika sosial-budaya.



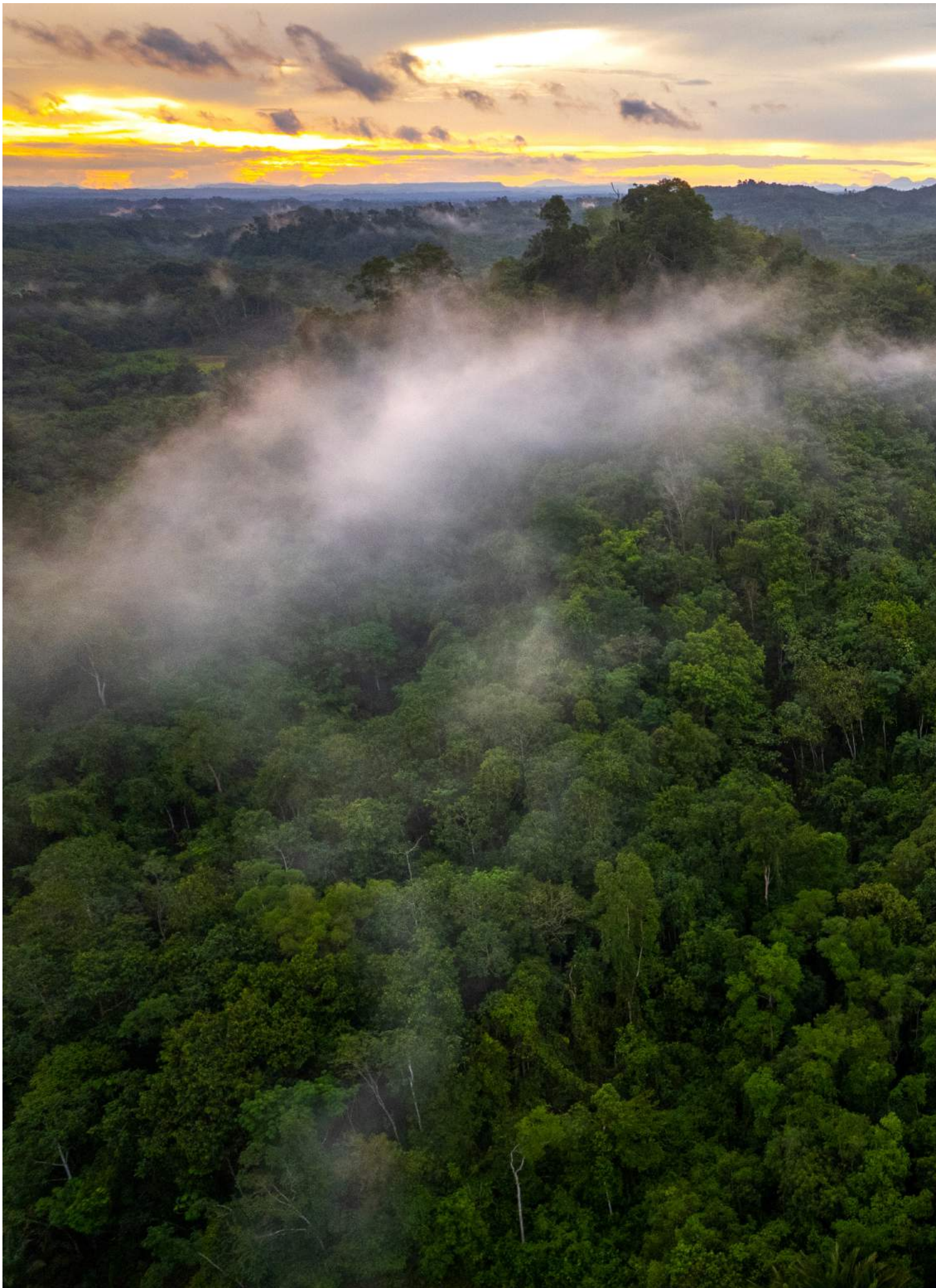
Anggota Tim Biodiversitas sedang Mengamati Perilaku Berbiak dan Makan Enggang Gading di Titik Pengamatan © Yayasan Planet Indonesia

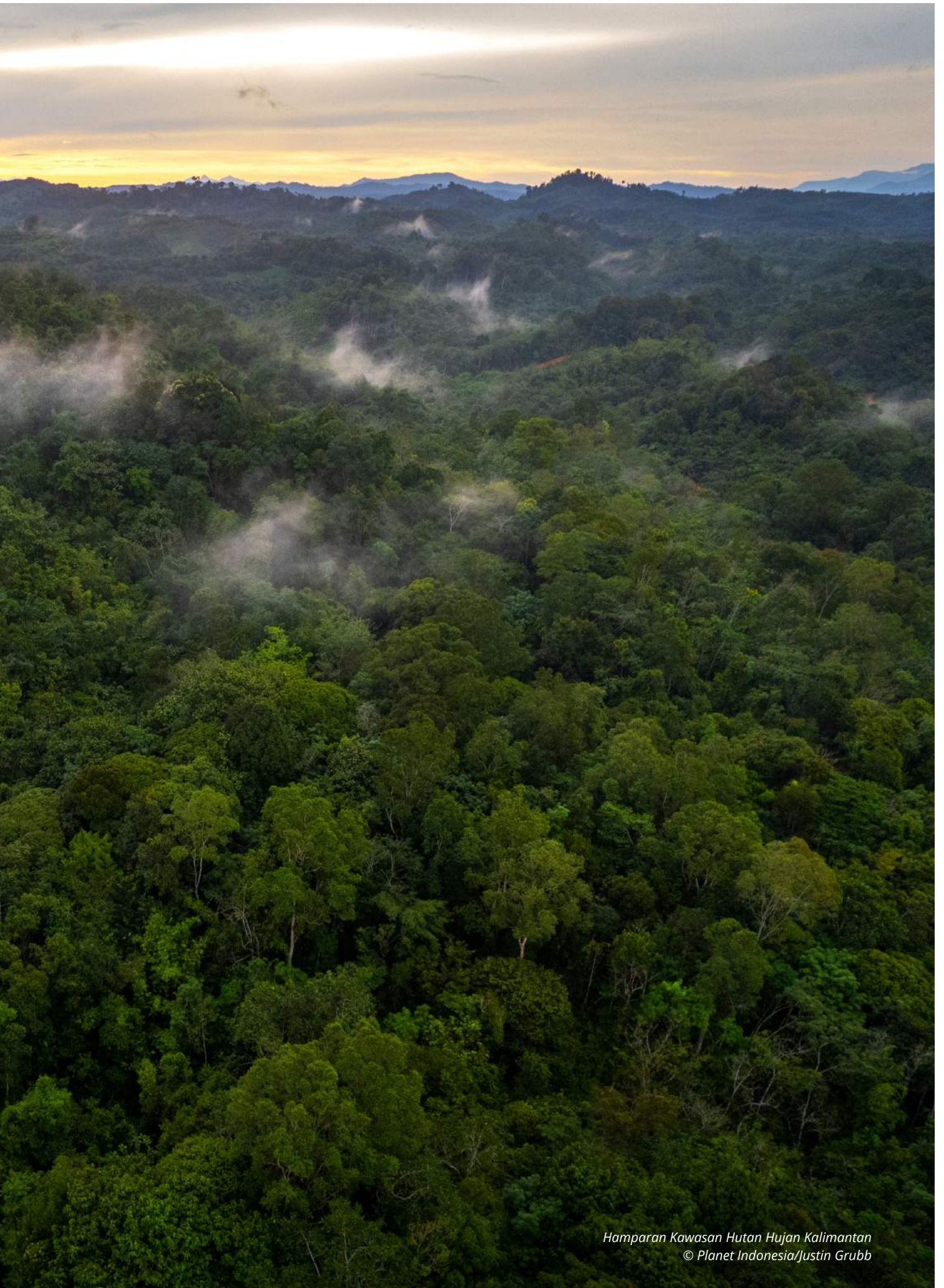
Biodiversitas

Berbagai usaha dilakukan pada masyarakat dalam jangka waktu yang panjang untuk mendorong pelestarian satwa liar di dalam kawasan konservasi/lindung. Salah satunya ialah melalui Program Biodiversitas, untuk merekam segala perubahan dalam keanekaragaman hayati, populasi, dan kepadatan satwa, yang akan tercatat secara langsung. Program Biodiversitas memusatkan perhatian pada kegiatan pendataan keanekaragaman hayati, terutama satwa liar, dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Pelaksanaan kegiatan ini menerapkan metode-metode seperti survei transek garis (*line transect*), titik hitung (*point count*), *Pooled Local Expert Opinion* (PLEO), pemasangan kamera jebak (*camera trap*), serta pemantauan berbiak dan pola makan Burung Enggang Gading. Harapannya, hasil survei ini dapat menjadi data dasar untuk merencanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan populasi satwa liar di dalam wilayah konservasi/lindung.

Konservasi Ek-Situ

Bagian konservasi ek-situ merupakan bagian penguatan fungsi yang dimiliki YPI untuk melakukan kegiatan konservasi di luar kawasan konservasi. Fokus Program Konservasi Ek-situ antara lain pada monitoring perdagangan satwa liar, advokasi tindak IWT, pusat rehabilitasi burung berkicau, dan perubahan perilaku. Lingkup wilayah yang menjadi prioritas konservasi ek-situ berada pada seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan menetapkan kawasan kunci pada Kota Pontianak dan seluruh wilayah perbatasan Indonesia-Sarawak (Malaysia).





*Hamparan Kawasan Hutan Hujan Kalimantan
© Planet Indonesia/Justin Grubb*



*Pemandangan Laut di Desa Labuan Kertasari, Sumbawa - NTB
Wilayah Indonesia Timur
© Yayasan Planet Indonesia/Putri Damatashia*

CAPAIAN

Menuju Kolaborasi Kemitraan:

Perjalanan Menuju Keseimbangan Lingkungan dan Kemanusiaan Melalui Aliansi BUMI KITA

Pertemuan Tahunan dan Refleksi Orientasi Kemitraan Tahun 2023 di Bogor pada tanggal 28-30 November 2023 merupakan sebuah momentum penting bagi tujuh LSM yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Pertemuan ini mengusung konsep kolaboratif dimana YPI tidak hanya berperan sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai peserta yang memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan LSM lainnya. Pendekatan ini memberikan ruang bagi diskusi multi arah tanpa adanya dominansi satu pihak.

Salah satu hasil signifikan dari pertemuan ini adalah kesadaran bahwa meskipun dengan konteks wilayah, strategi pendekatan, dan visi-misi yang berbeda, tujuh LSM tersebut dapat menyelaraskan tujuan bersama untuk mencapai keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Sebagai hasilnya, mereka sepakat untuk membentuk satu wadah kolaboratif yang diberi nama Aliansi BUMI KITA. Pembentukan aliansi ini bukan hanya didasarkan pada semangat kolaborasi, tetapi juga pada perumusan bersama visi, misi, nilai, serta kesepakatan terkait komunikasi dan koordinasi untuk kepentingan bersama.

Diskusi yang berlangsung selama pertemuan ini juga menghasilkan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan. Rencana tersebut dirancang untuk mematangkan konsep-konsep yang telah diusulkan dan didokumentasikan, dengan harapan akan mengarah pada deklarasi resmi Aliansi BUMI KITA di tingkat nasional. Dengan demikian, pertemuan tahunan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kolaborasi yang lebih kokoh dan terstruktur di antara LSM yang berpartisipasi.



Erwin Basrin (Direktur AKAR Foundation) sedang Menyampaikan Pemikirannya dalam Proses Membangun Konsep dan Nilai Aliansi Bumi Kita © Yayasan Planet Indonesia

PUMK dalam Aksi:

Implementasi PUMK dalam Proyek 'Connect' di Wilayah Pantai Mataram dan Lombok

Pada bulan Agustus 2023, YPI memfasilitasi kegiatan *Learning* Implementasi dan Pengembangan PUMK oleh Mitra dan TOT (*Training of Trainers*) untuk staf dan pengurus lembaga mitra pada 3 lembaga yaitu AKAR Foundation, JARI, dan Tananua. Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menerapkan rencana perluasan adaptif untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam prosesnya, setiap mitra merenungkan bagaimana proses implementasi PUMK dapat disesuaikan dengan konteks wilayah mereka masing-masing. Hasil dari refleksi ini menunjukkan adanya bentuk lokal dari pendekatan PUMK yang telah dikembangkan oleh JARI dan Tananua.

Di Mataram dan Lombok, yang merupakan wilayah kerja JARI, konteksnya adalah wilayah pantai dengan keindahan alam yang luar biasa. Hal ini mendorong tingkat kepadatan dan perputaran ekonomi yang tinggi, terutama dalam sektor pariwisata. JARI mengembangkan proyek "Connect" yang menggabungkan konservasi dengan ekowisata dengan memanfaatkan pendekatan model inti PUMK. Proyek "Connect" berfokus pada kerja sama dengan desa dan semua *stakeholder* lokal untuk membentuk rumah bersama di bawah skema kelompok yang disediakan oleh Dinas Kelautan. DEWI Bahari dijadikan legalitas kelompok, sementara beberapa pokja juga difasilitasi untuk tergabung dalam BUMDes. Dana ketahanan menjadi fokus kelompok kerja yang akan mendampingi proyek hingga selesai. Delapan orang staf dan pengurus lembaga mitra langsung mendapat manfaat. Implementasi proyek telah dilakukan di empat desa layanan, yaitu Desa Pototano, Kertasari, Padaguar, dan Labuan Pandan, melibatkan 16 organisasi lokal dalam upaya sosialisasi program dan pemetaan *stakeholder*.

Kegiatan ini bukan hanya tentang penerapan PUMK, tetapi juga tentang memperkuat keterlibatan lokal dan membangun kapasitas untuk memastikan keberlanjutan inisiatif ini. Dengan demikian, *learning* implementasi dan pengembangan PUMK menjadi langkah nyata dalam menyongsong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, konservasi lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.



Mess Riyandi (Community Finance Technical Assistant) sedang Berbagi Pengetahuan dalam Pelatihan Konsep Dana Ketahanan kepada Staf JARI di Mataram, NTB
© Yayasan Planet Indonesia

Kajian Keadilan Data dalam Praktik Konservasi

Pada tahun 2023, YPI melakukan kajian keadilan data di wilayah dampingan Kubu Raya, meliputi Desa Sungai Nibung, Dabong, Mengkalang Jambu, Seruat Dua, dan Tanjung Harapan. Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan praktik konservasi data yang lebih partisipatif dan demokratis. Pendekatan yang berpusat pada masyarakat membuat YPI berupaya memberdayakan komunitas marjinal yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan lindung untuk memimpin dan mendapatkan manfaat dari praktik data, mulai dari merancang indikator hingga memimpin pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data.

Fokus utama kajian ini adalah pada data perikanan dan data patroli SMART. Data perikanan dipilih karena memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara data patroli SMART dipilih karena fokusnya pada pendataan dan monitoring. Metode survei dilakukan dengan wawancara singkat dan semi terstruktur oleh *Field Facilitator* (FF) kepada kelompok responden yang telah ditentukan sebelumnya.

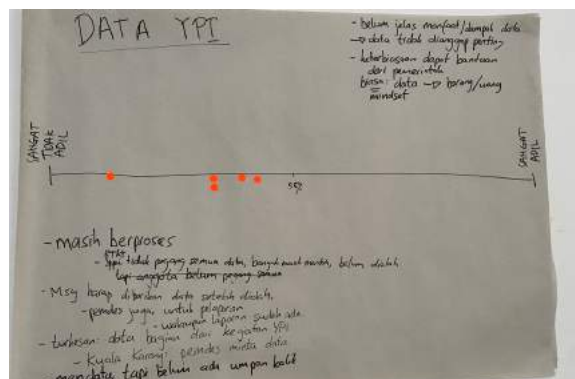
Kajian ini menggunakan kerangka kerja yang dikembangkan oleh Pritchard dkk. (2022), yang mengidentifikasi enam dimensi utama keadilan data konservasi. Dimensi tersebut adalah komposisi data, pengumpulan data, penggunaan data, akses data, kontrol/kuasa data, dan dampak data. Evaluasi terhadap makalah ini dilakukan berdasarkan enam dimensi tersebut, untuk menilai sejauh mana praktik konservasi yang dilakukan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan data yang diinginkan.



Proses Wawancara Semi Terstruktur pada Fasilitator Lapangan Wilayah Kubu Raya
© Yayasan Planet Indonesia/
Paul Thung

Umpan Balik Hasil Kajian Keadilan Data pada Fasilitator Lapangan Wilayah Kubu Raya
© Yayasan Planet Indonesia/
Paul Thung

Visualisasi Hasil Kajian Keadilan Data Berdasarkan Wawancara bersama Fasilitator Lapangan
© Yayasan Planet Indonesia/
Paul Thung



Menuju Kemandirian:

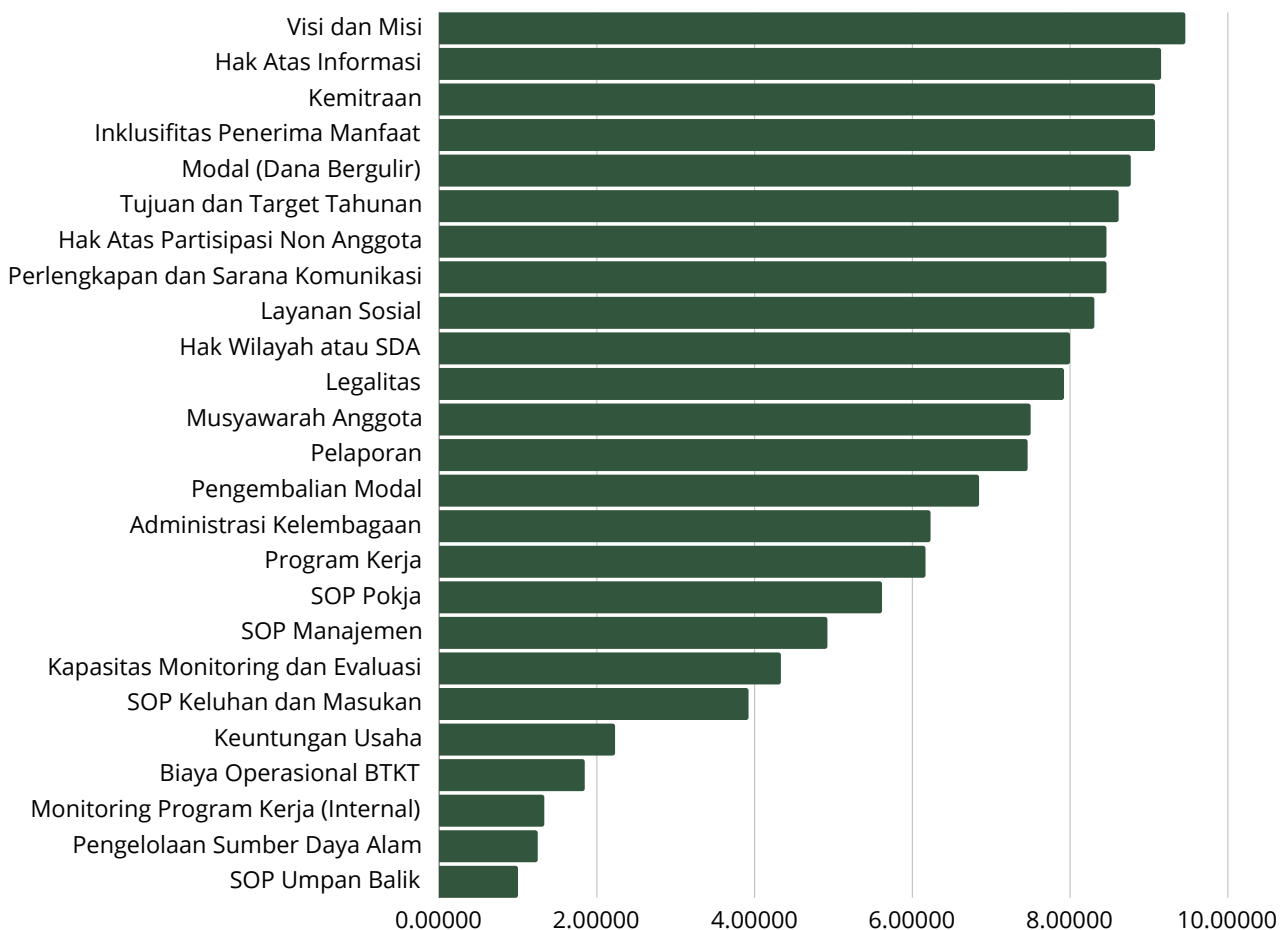
Mengukur Perjalanan Badan Tata Kelola Terkait dalam Upaya Pelestarian Lingkungan

Pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) YPI tahun 2022-2026, salah satu area fokus YPI adalah kemandirian BTKT, dalam hal ini adalah PUMK dan LDPH. Sejak 2017 hingga saat ini, kami telah mendampingi 47 BTKT, terdiri dari 38 PUMK dan 9 LDPH, dengan tujuan agar mereka mampu mandiri dalam berbagai aspek. Pada tahun 2023, kami merumuskan alat untuk mengukur tingkat kemandirian setiap BTKT yang kami dampingi melalui pembuatan peta perjalanan (*roadmap*) BTKT.

Dari berbagai sumber seperti dokumen *The Natural Resource Governance Framework* dan Kepmendes No. 145 tahun 2022, YPI telah menetapkan 25 indikator tata kelola yang baik sebagai dasar menuju kemandirian. Indikator tersebut menjadi landasan dalam menilai status BTKT yang didampingi dan menentukan tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana kerja tahunan. Terdapat empat tingkatan kemandirian yang telah disepakati, yaitu dasar, berkembang, maju, dan mandiri.

Penilaian kemandirian dilakukan melalui dua tahapan terpisah, yaitu kajian meja (*desktop study*) oleh fasilitator atau pendamping BTKT, serta kajian lapangan (*field study*) oleh pengawas dan pembina BTKT. Meskipun hasil penilaian bersifat subjektif karena melibatkan sudut pandang fasilitator dan pengawas, catatan dari setiap penilaian menjadi dasar untuk rencana tindak lanjut oleh setiap BTKT. Dari perspektif YPI, BTKT yang berada dalam status dasar dan berkembang memerlukan perhatian lebih intensif daripada yang telah mencapai tingkat maju atau mandiri. Namun demikian, BTKT yang telah maju atau mandiri juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk penguatan atau peningkatan kapasitas pengelolaan.

Grafik 1. Hasil Penilaian Kajian Meja (Desktop Study) dari 25 Indikator Perjalanan BTKT di Bentang Alam Gunung Nyiut-Penrisen © Yayasan Planet Indonesia/MEL





YAYASAN
PLANET
INDONESIA

BADAN TATA KELOLA TERKAIT (BTKT)

BTKT merupakan organisasi masyarakat di tingkat desa/dusun/RT yang bermitra dengan Yayasan Planet Indonesia (YPI), tersebar di **7 kabupaten di Kalimantan Barat**. Sejak tahun **2017-2023** sebanyak **47 BTKT (PUMK dan LDPH)** didampingi oleh YPI melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan konservasi di total **27 desa** dengan lebih dari **38.000 penerima manfaat**.

PUMK

Pelayanan Usaha Masyarakat Konservasi

LDPH

Lembaga Desa Pengelola Hutan

38



BTKT

9

3.592



Anggota

144

25



Desa

9

Data: per Januari 2024

www.planetindonesia.org

Forum Multipihak:

Bersatu Melawan Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat

BKSDA Kalbar mengambil langkah proaktif dengan menginisiasi forum multipihak di Kecamatan Air Besar. Ini merupakan bagian dari upaya strategis YPI terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang serius dengan memfasilitasi forum tersebut, karena hampir seluruh desa yang ada di Kecamatan Air Besar berada di dalam dan di sekitar kawasan Cagar Alam. Pertemuan awal forum ini digelar di Aula Kantor Kecamatan Air Besar pada bulan Juli 2023. Para pihak menyepakati berbagai langkah penting untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Langkah-langkah penting dari hasil pertemuan tersebut melahirkan pembentukan forum resmi yang didokumentasikan dalam sebuah berita acara yang dikeluarkan oleh BKSDA Kalbar. Salah satu kesepakatan utama dalam pertemuan ini adalah penjadwalan kegiatan sosialisasi karhutla di tingkat desa, serta penentuan materi sosialisasi karhutla dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api (MPA), khusus untuk Desa Dange Aji. Selain itu, forum juga menyusun rencana tindak lanjut untuk menyebarkan informasi tentang karhutla dan dampak kabut asap bagi kesehatan di seluruh desa di Kecamatan Air Besar.

Forum multipihak ini melibatkan berbagai instansi dan lembaga terkait, termasuk BKSDA Kalbar, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak, Dinas Kesehatan Kabupaten Landak, Manggala Agni Daops Pontianak, UPTD KPH Sanggau Barat dan Landak, Polsek Kecamatan Air Besar, serta Koramil 1201-12 Air Besar. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat dilaksanakan secara efektif.

Realisasi dari rencana tersebut terwujud pada bulan Agustus 2023, ketika dilakukan sosialisasi di empat desa, yaitu Desa Bentiang, Tengon, Dange Aji, dan Engkangin, dengan total peserta yang hadir mencapai 193 orang. Sementara itu, sosialisasi di desa-desa lainnya dilakukan secara independen oleh Resort Konservasi Wilayah (RKW) Serimbu BSKDA Kalbar, sebagai upaya memperluas jangkauan informasi dan pengetahuan terkait pencegahan karhutla.



Penyampaian Kata Sambutan dan Pengantar Kegiatan Sosialisasi Karhutla oleh Kepala Desa Dange Aji
© Yayasan Planet Indonesia/
Ayyub



Pertemuan Forum Multipihak di Aula Kecamatan Air Besar
© Yayasan Planet Indonesia/
Ayyub

Eksistensi Satwa Liar dari Sudut Pandang Kamera Jebak: *Mendata Kelimpahan Satwa Liar di Kawasan CAGN Wilayah Landak*

YPI menggunakan pendekatan berbasis ilmiah dalam kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui Program Biodiversitas, yang berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati melalui kegiatan survei (pendataan) dan monitoring (pengamatan) satwa liar, dan penelitian dengan mengembangkan pola kemitraan dengan masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan konservasi, khususnya di CAGN, serta bekerja sama dengan BKSDA Kalbar.

Salah satu aktivitas survei dan monitoring satwa liar yang dilakukan, yaitu survei satwa liar yang dilakukan menggunakan kamera jebak (*camera trap*). Dasar penentuan lokasi pemasangan kamera jebak menggunakan titik (koordinat) yang dibuat dalam grid secara *purposive sampling*. Kamera jebak digunakan untuk memonitor populasi jenis satwa yang biasanya sulit ditemukan. Data-data yang dihasilkan dari kamera jebak adalah berupa foto dan video.

Untuk tahun 2023, pada musim kering dilakukan pemasangan sebanyak total 29 kamera jebak di 2 lokasi pemasangan, yaitu area Camp 1 dan Camp 2 di Dusun Tauk, Desa Engkangin, Kabupaten Landak. Terekam sebanyak 331 frekuensi rekaman dengan jumlah satwa liar terdata sebanyak 30 jenis di 2 lokasi tersebut, diantaranya Burung Ruai (*Argusianus argus*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Kera Ekor Panjang (*Macaca fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*), dll. Dan satwa yang paling banyak terekam kamera jebak adalah jenis Beruk dan Kera Ekor Panjang. Biasanya, dalam 1 tahun, dilakukan 2 kali (periode) pemasangan kamera jebak, yaitu pada rentang waktu musim kering (Maret-Agustus) dan musim basah (September-Februari).

Data tersebut untuk mengetahui potensi kelimpahan dan sebaran (distribusi) jenis satwa liar, serta untuk mengetahui tren peningkatan atau penurunan populasi satwa liar di suatu kawasan, yang dapat digunakan dalam rencana pengelolaan dan strategi perlindungan kawasan, serta merumuskan kebijakan konservasi yang memastikan perlindungan satwa liar dilindungi dan terancam punah.

Kijang (*Muntiacus muntjak*)
yang Terekam Kamera Jebak
di Camp 1, Dusun Tauk
© Yayasan Planet Indonesia



Tim Biodiversitas sedang
Memasang Kamera Jebak
di Camp 2, Dusun Tauk
© Yayasan Planet Indonesia



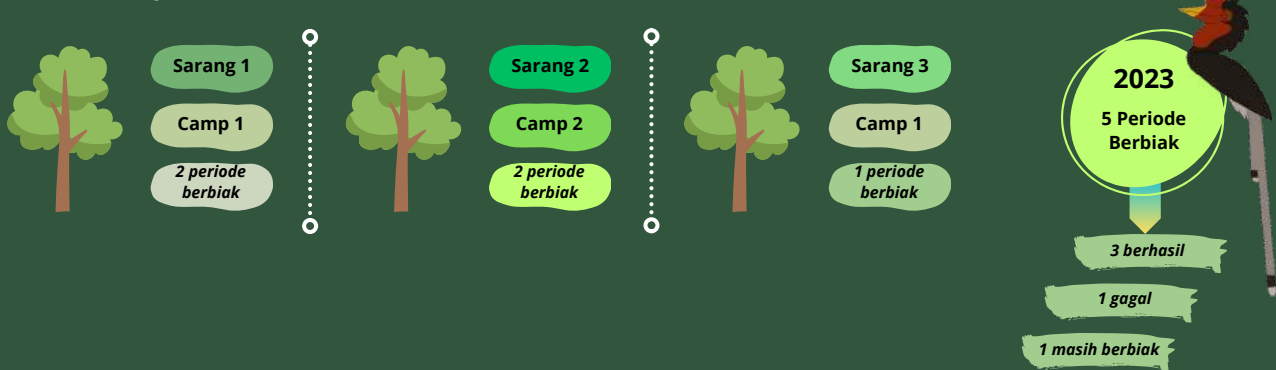
Pengamatan Perilaku Berbiak Enggang Gading: Upaya Melestarikan Populasi Jenis Petani Hutan di Kawasan CAGN

Secara khusus, Program Biodiversitas berkontribusi terhadap perlindungan dan perbaikan ekosistem kawasan hutan. Dengan menggunakan data ilmiah yang valid, YPI dapat memperoleh data terperinci tentang populasi, distribusi, dan perilaku satwa liar.

Sejak tahun 2018, YPI melakukan pengamatan perilaku berbiak Burung Enggang Gading (*Rhinoplax vigil*) sebagai salah satu satwa liar prioritas dilindungi di kawasan CAGN. Status konservasi jenis Enggang Gading adalah terancam punah (*Critically Endangered*), yang artinya mengalami risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam (berisiko punah dalam waktu dekat), menurut IUCN.

Tim Biodiversitas secara rutin melakukan pengamatan (*monitoring*) berbiak Enggang Gading pada 3 titik pohon sarang. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 tercatat sebagai musim berbiak Enggang Gading yang paling produktif, yaitu dengan total 5 periode berbiak dalam 1 tahun. Biasanya, dalam 1 tahun hanya terjadi 1 periode berbiak pada masing-masing sarang.

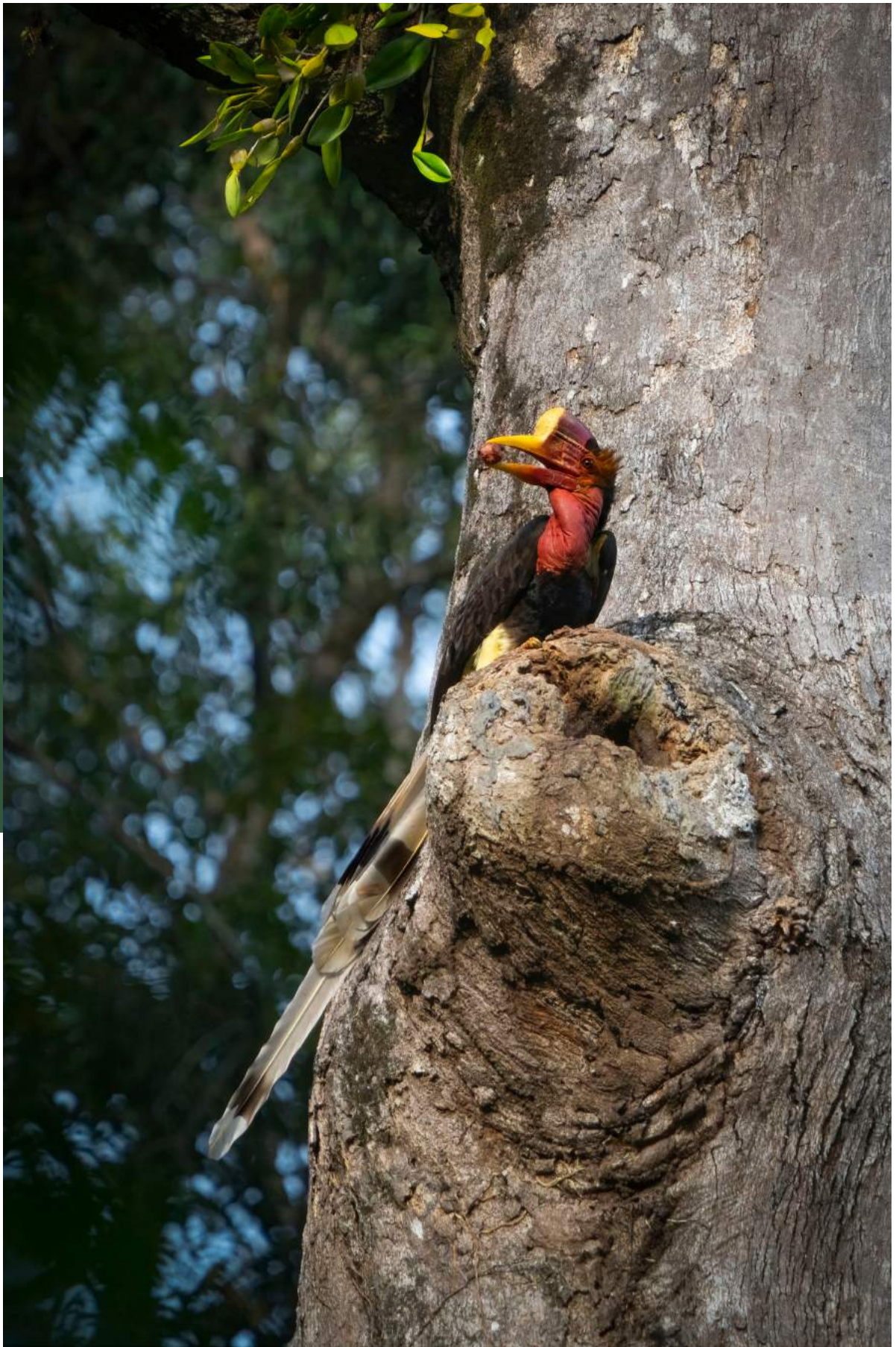
Detil Lokasi Sarang dan Frekuensi Berbiak



Dari hasil pengamatan berbiak Enggang Gading oleh Tim Biodiversitas sepanjang tahun 2023, dari 5 periode berbiak tersebut, 3 diantaranya sudah selesai proses berbiak dan anak keluar dari sarang (berhasil), 1 periode berbiak gagal, dan 1 periode masih dalam proses berbiak (induk betina dan anak masih berada di dalam sarang). Indikator keberhasilan berbiak, salah satunya dinilai saat anak sudah berhasil keluar dari sarang dan terbang meninggalkan sarang bersama induknya.

Selain perilaku berbiak, hal lain yang juga diamati adalah perilaku makan Burung Enggang Gading, untuk mengetahui jenis pakan dan frekuensi pemberian pakan oleh jantan. Upaya pengamanan lokasi sarang juga dilakukan oleh tim bersamaan dengan dilakukannya pengamatan perilaku berbiak dan makan Enggang Gading ini, untuk memastikan terjaganya pasangan Enggang Gading (termasuk anakan) dari berbagai gangguan atau aktivitas yang dapat mengancam populasi dan proses berbiaknya.

Dengan meningkatnya aktivitas berbiak, dapat menjadi indikasi adanya peningkatan populasi Enggang Gading yang ditandai dengan keberhasilan berbiak, khususnya pada titik-titik sarang yang diamati di kawasan CAGN di wilayah Landak.



Enggang Gading Jantan sedang Memberi Makan Betina dan Anak pada Periode Berbiak Kedua di Sarang 1, Oktober 2023
© Planet Indonesia/Justin Grubb

Kelompok Kerja (Pokja) Baru Telah Diinisiasi dari PUMK: *Membangun Mekanisme Pasar untuk Produk PUMK melalui Pokja Pemasaran*

YPI berkomitmen untuk memfasilitasi mekanisme pasar yang berkeadilan bagi masyarakat dampingan melalui pendekatan PUMK. Setiap PUMK di wilayah dampingan memiliki komoditas unggulan yang telah berhasil memperoleh akses pasar. Namun, meningkatkan mekanisme pasar yang sudah ada agar lebih adil bagi petani dampingan menjadi tantangan yang dihadapi saat ini.

Sejak tahun 2020, YPI melakukan Analisis Rantai Nilai (*Value Chain Analysis/VCA*) pada berbagai wilayah dampingan terhadap komoditas pertanian dan perikanan. Tahun 2023, YPI menindaklanjuti hasil survei tersebut dengan pembentukan Pokja Pemasaran di setiap PUMK di Bengkayang. Hingga saat ini, sekitar 7 PUMK telah berhasil membentuk Pokja Pemasaran. Pokja Pemasaran ini berperan sebagai penampung hasil pertanian dan memungkinkan penjualan langsung kepada konsumen akhir, memberikan alternatif jalur pemasaran bagi petani, serta memperluas pasar selain menggunakan jalur tengkulak (pedagang perantara) yang sudah ada.

Beberapa kondisi yang menjadi dasar diperlukannya Pokja Pemasaran, antara lain:

- Dari hasil survei VCA, terdapat informasi bahwa adanya jalur rantai penjualan yang kurang efektif, sehingga melalui Pokja Pemasaran diharapkan dapat mengefisienkan penjualan langsung kepada konsumen akhir;
- Perlu adanya skema pembiayaan mandiri kepada BTKT, dengan harapan dapat mengurangi intervensi dari YPI. Melalui Pokja Pemasaran, diharapkan dapat menjadi sebuah skema pembiayaan kepada BTKT melalui hasil keuntungan yang diperoleh dari penjualan hasil usaha;
- Perlu juga adanya proses diversifikasi pasar, sehingga tidak hanya berfokus kepada pasar lokal. Melalui Pokja Pemasaran, yang akan diperkuat juga dengan badan legalitas dan pelatihan teknis, diharapkan akan dapat menjadi modal untuk melakukan koordinasi dengan pelaku pasar lainnya.

Pada bulan September 2023, dilakukan pengenalan awal bagi Pokja Pemasaran di setiap PUMK, termasuk pembahasan permasalahan terkait pemasaran di masing-masing wilayah PUMK. Selanjutnya, pada bulan November 2023, pendamping PUMK melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, UKM, Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, serta Dinas Pangan, Pertanian, dan Perkebunan Kabupaten Bengkayang. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan data pasar dan lingkup kerja dari masing-masing dinas, guna menjadi pemateri pada pelatihan berikutnya bagi Pokja Pemasaran.

Diperlukan peningkatan kapasitas melalui strategi *branding*, informasi pasar, aturan terkait pemasaran, dan pengembangan produk baru atau pembaruan produk yang sudah ada. Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan Pokja Pemasaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif di masa mendatang.



Pokmaswas dan MPA:

Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut bersama Masyarakat Lokal

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) merupakan salah satu skema Kementerian Kelautan dan Perairan (KKP) yang diturunkan kepada pemerintah daerah untuk melindungi spesies tertentu yang terancam punah dan rentan, serta untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi. Ada 5 KKPD di Kalimantan Barat, dimana salah satunya adalah KKPD Kubu Raya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 92 Tahun 2020 dengan luas kawasan 134.409,14 ha yang terbagi dalam 3 zona, yaitu zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya. Dimana target konservasinya adalah kawasan mangrove, pesut (*Irrawaddy Dolphin/Orcaella brevirostris*), dan jenis-jenis udang penaeid.

Berdasarkan penetapan pada Kepmen-KP 92/2020 maka salah satu langkah yang perlu dilakukan untuk pengelolaan kawasan secara efektif adalah dengan skema kemitraan, sesuai dengan Peraturan Menteri KP No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Oleh sebab itu pada Agustus 2022, YPI melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan dengan DKP Provinsi Kalbar yang tujuan besarnya untuk bersama-sama melestarikan sumberdaya kelautan perikanan di KKPD Kubu Raya melalui pemberdayaan masyarakat di desa-desa dampingan YPI yang masuk dalam KKPD Kubu Raya.

Pada tahun 2023, meneruskan PKS yang telah disepakati sebelumnya, bahwa YPI juga terlibat dalam penilaian Efektivitas Kawasan Konservasi (EVIKA) di KKPD Kubu Raya bersama dengan lembaga swasta lain yang bekerja di dalam kawasan konservasi. Hasil penilaian yang diperoleh pada tahun 2023 adalah 40,2 %. Artinya, YPI berkontribusi besar dalam pemberdayaan kepada masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi, antara lain Desa Sungai Nibung, Kuala Karang, Dabong dan Tanjung Harapan. Adapun program-program yang dilakukan, seperti usaha simpan-pinjam, dana usaha produktif untuk menunjang usaha perikanan masyarakat, literasi, monitoring hasil tangkapan nelayan, dan keluarga sehat.

Namun memang masih ada beberapa program yang perlu disinkronkan dengan program dari DKP Provinsi untuk pengelolaan kawasan yang lebih efektif. Salah satu program yang menjadi penting untuk dikembangkan adalah pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di dalam kawasan konservasi, karena menurut data pemetaan partisipatif pada tahun 2022 banyak masyarakat yang belum tahu adanya kawasan konservasi dan fungsi zona-zona yang adalah di dalamnya, sehingga masyarakat masih melakukan aktifitas di dalam zona inti, yang dimana sesuai aturan kebijakan tidak boleh dilakukan aktivitas penangkapan, hanya diperbolehkan untuk penelitian, termasuk masih banyaknya nelayan dari luar Kubu Raya yang menangkap hasil perikanan di dalam kawasan menggunakan alat tangkap *trawl* (pukat).

Dari kondisi tersebut, YPI melihat perlu adanya pengawasan yang lebih intensif di dalam kawasan konservasi laut. Dan pada Desember 2023, YPI mencoba memfasilitasi masyarakat desa dampingan untuk membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), yang dilanjutkan dengan "Workshop Peran Masyarakat dan Dukungan Para Pihak dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pesisir Kubu Raya".

Workshop ini ditujukan untuk penguatan pemahaman POKMASWAS tentang kawasan konservasi, mendiskusikan peran dan fungsi POKMASWAS, termasuk mendorong dukungan dari para pihak seperti DKP Provinsi, PSDKP Pontianak, Dinas Perikanan Kubu Raya, DPMD Kubu Raya, dan pemerintah desa. Hasil dari workshop ini adalah adanya pembentukan POKMASWAS di 4 desa, yaitu Desa Dabong, Sungai Nibung, Kuala Karang dan Tanjung Harapan. POKMASWAS ini ke depannya akan melakukan patroli atau pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan secara terpadu, dengan keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

RPSDAA dan Forum 7:

Kolaboratif Mengelola Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab menjadi fokus nasional dan juga daerah guna meningkatkan mata pencaharian dan perlindungan beberapa spesies yang rentan dan terancam punah. Adanya kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan salah satu pendekatan pengelolaan yang efektif, dengan masyarakat sebagai pengguna langsung sumberdaya alam dan pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan.

Berdasarkan pendekatan kolaboratif tersebut, YPI pada tahun 2022 menginisiasi penerapan Program *Locally Managed Marine Areas* (LMMA) di kawasan mangrove dan pesisir Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, dengan disepakatinya penutupan sementara wilayah kelola selama 3 bulan, atau dikenal dengan penutupan sementara/*temporary closure* (buka-tutup sungai), untuk memberi jeda waktu bagi spesies kunci seperti kepiting, termasuk biota perairan ekosistem mangrove lainnya untuk berkembang biak mencapai bobot yang layak untuk ditangkap.

Melihat dari tujuan Program LMMA tersebut dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, dimana adanya peningkatan hasil tangkapan nelayan (dari hanya mendapat 0,2 gr/ekor kepiting, setelah adanya penutupan sementara meningkat menjadi 0,5 gr/ekor), maka pada tahun 2022 YPI memfasilitasi 6 kepala desa, yaitu Desa Sungai Nibung, Kuala Karang, Dabong, Seruat Dua, Mengkalang dan Mengkalang Jambu untuk menyepakati secara bersama pengelolaan kawasan mangrove dan pesisir di Kubu Raya yang tertuang dalam PERMAKADES No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kawasan Mangrove dan Kawasan Pesisir Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Kubu.

Di tahun 2023, YPI terus berproses bersama masyarakat untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam yang lebih terstruktur dan tercatat untuk dapat dijadikan sebagai acuan pengelolaan di tingkat desa secara komprehensif. Maka YPI menginisiasi satu program yaitu Rencana Pengelolaan Sumberdaya Alam Adaptif (RPSDAA), dimana tujuan dari program ini adalah untuk mendokumentasikan semua kegiatan pengelolaan yang sudah berjalan seperti LMMA dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Kubu Raya yang akan diimplementasikan, sehingga dapat terlihat kegiatan apa saja yang akan dilakukan, pembagian peran antar lembaga yang ada di tingkat desa, serta capaian dari pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa, diperlukan adanya penghubung antar lembaga dan masyarakat di tingkat desa dalam pengelolaan tersebut, maka pada tahun 2023 juga YPI menginisiasi pembentukan Forum 7 di wilayah Kubu Raya. Forum 7 memiliki peran penting sebagai penghubung di tingkat desa yang bersama-sama YPI, masyarakat, lembaga di tingkat tapak hingga provinsi merencanakan RPSDAA. Forum 7 ini dibentuk pada bulan Juni 2023, yang di dalamnya beranggotakan 7 orang yang mewakili 7 desa dampingan YPI di Kubu Raya, yaitu Desa Sungai Nibung, Desa Dabong, Desa Kuala Karang, Mengkalang, Mengkalang Jambu, Seruat Dua dan Tanjung Harapan, dan ada juga pembina dari DKP Provinsi Kalbar, DLHK Provinsi Kalbar, 7 kepala desa, dan Camat.

Forum 7 ini juga mendapatkan bimbingan pelatihan untuk menyusun dokumen RPSDAA, yang mencakup 11 tahapan, yaitu (1) Pemetaan Sumberdaya Alam, (2) Identifikasi Kebijakan dan Regulasi, (3) Identifikasi Tantangan dan Hambatan, (4) Menentukan Indikator Capaian, Target, dan Bimbang batas, (5) Strategi Pengelolaan, (6) Pengawasan dan Monitoring, (7) Penegakan Hukum, (8) Konsultasi Publik, (9) Pengesahan Dokumen RPSDAA, (10) Implementasi Rencana Pengelolaan, dan (11) Evaluasi Rencana Pengelolaan. Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2023 telah sampai pada Tahap 7 dan juga sudah tersusun 4 draft dokumen RPSDAA untuk 4 desa di Kubu Raya, yaitu Desa Dabong, Mengkalang, Mengkalang Jambu, dan Seruat Dua.

RPSDAA ini tidak hanya dilakukan untuk desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya, namun dilakukan juga di desa-desa di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Landak, dimana sudah dihasilkan 4 draft dokumen RPSDAA di tahun 2023 ini.



Pengelolaan Kawasan Mangrove secara Efektif dan Berkelanjutan lewat Program RPSDAA
© Yayasan Planet Indonesia/
Lia Syafitri



Koordinasi Forum 7 Wilayah Kubu Raya
© Yayasan Planet Indonesia/
Roni Bia Santo

Melangkah Bersama Menuju Perhutanan Sosial:

Catatan Perjalanan Pengajuan Hutan Desa Tahun 2023 di Kabupaten Sintang dan Sekadau



Penyerahan Dokumen
Pengajuan Hutan Desa
kepada KPH Sekadau
© Yayasan Planet Indonesia

Pada bulan Juni 2023, terdapat tiga desa yang mengajukan skema Perhutanan Sosial (PS), yang dikenal sebagai Hutan Desa (HD). Desa-desa tersebut adalah Desa Karang Betung, Desa Pantok di Kabupaten Sekadau, dan Desa Temawang Bulai di Kabupaten Sintang. Total luas pengajuan HD adalah 5.000 hektar untuk Desa Pantok, 4.992 hektar untuk Desa Karang Betung, dan 3.477 hektar untuk Desa Temawang Bulai.

Proses pengajuan dimulai dengan sosialisasi awal kepada masyarakat, yang kemudian mereka bersepakat untuk menggunakan skema HD. Dalam prosesnya, YPI turut serta dalam proses awal ini dengan memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) dan mendampingi pemerintah desa dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan LDPH. Selain itu, YPI juga berperan dalam memfasilitasi pengurus dalam mengumpulkan data penerima manfaat langsung dan tidak langsung, yang kemudian diserahkan kepada Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) untuk diteruskan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pada bulan September 2023, surat tugas untuk kegiatan Verifikasi Teknis (vertek) telah diterbitkan. Beberapa komponen turun untuk melakukan vertek, termasuk BPSKL (2 orang), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) (2 orang), serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masing-masing dari Ketapang Utara, Sekadau, dan Melawi, masing-masing 2 orang. Selain itu, YPI juga mengirimkan dua orang stafnya untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kegiatan vertek dilakukan selama 12 hari, meliputi verifikasi administrasi di pemerintah desa dan verifikasi lapangan untuk memeriksa wilayah HD. Desa-desa yang diajukan ini merupakan salah satu dari beberapa desa yang pertama kali difasilitasi oleh YPI dalam proses pengajuan hak pengelolaan HD melalui skema Perhutanan Sosial. Meskipun belum memiliki pengalaman yang cukup, YPI berhasil memperoleh nomor registrasi dinas dalam waktu empat bulan sebagai tanda bahwa pengajuan mereka telah diproses oleh kementerian. Harapan untuk tahun 2024 adalah agar SK LDPH dapat diterima dan diserahkan kepada kelompok, sehingga proses pengelolaan hutan oleh masyarakat dapat segera dimulai.



Lanskap Hutan Lindung Gunung Naning
© Yayasan Planet Indonesia/
Victor Fidelis Sentosa

Sosialisasi Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL): *Membangun Kesadaran Bersama dalam Pelestarian Keanekaragaman Hayati*

Dalam rangka menyelaraskan upaya pengamanan kawasan lindung dan pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya TSL, dilakukan kegiatan Sosialisasi Perlindungan TSL di Desa Sungai Segak dan Desa Nanga Pari, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada bulan Oktober 2023. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk anak-anak, terkait jenis-jenis TSL yang dilindungi di Indonesia dan internasional, agar dapat ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam melindungi TSL yang ada di kawasan hutan sekitar desa/dusun mereka.

Hadir sebagai narasumber utama dalam sosialisasi ini adalah Seksi Konservasi Wilayah (SKW) II Sintang BKSDA Kalbar (dimana wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu), yang mensosialisasikan tentang Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, serta peran penting satwa liar bagi keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem hutan. Kegiatan ini dihadiri pula oleh UPTD KPH Melawi, pemerintah desa, perangkat adat, dan tokoh adat setempat. Kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh total 111 orang masyarakat Desa Sungai Segak (64 orang) dan Desa Nanga Pari (47 orang), Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang.



Plang Himbuan Stop Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Desa Nanga Pari
© Yayasan Planet Indonesia

Penyampaian Materi dari SKW II Sintang BKSDA Kalbar pada Sosialisasi TSL di Desa Sungai Segak
© Yayasan Planet Indonesia

Sosialisasi TSL di Desa Sungai Segak
© Yayasan Planet Indonesia

Sosialisasi TSL di Desa Nanga Pari
© Yayasan Planet Indonesia

Menjaga Keseimbangan Alam: *Pelepasliaran Trenggiling dalam Kegiatan SMART Patrol*

Dalam kegiatan SMART Patrol di wilayah HLGN Sintang-Sekadau, telah dilakukan pelepasliaran 1 ekor satwa liar dilindungi jenis Trenggiling (*Manis javanica*) di kawasan hutan Dusun Ladak, Desa Meragun, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau. Kegiatan pelepasliaran satwa liar tersebut tidak terlepas dari koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, yaitu UPTD KPH Sekadau dan Pemerintah Desa Meragun.

Satwa liar Trenggiling tersebut diserahkan oleh masyarakat Dusun Ladak bernama Pak Apen. Pak Apen menemukan Trenggiling yang terlihat di sekitar pemukiman masyarakat yang berdampingan dengan kawasan berhutan. Berawal dari kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap satwa liar dilindungi, kemudian Pak Apen bertindak untuk mengamankan satwa liar tersebut, melaporkan, dan menyerahkannya kepada Tim SMART Patrol PUMK Mentrap Pugan di Dusun Ladak melalui koordinasi dengan YPI.

Trenggiling tersebut segera dilepasliarkan kembali ke habitatnya di kawasan hutan Bukit Sungai Beruk, yang berada pada pengawasan zona patroli Tim SMART Patrol di Dusun Ladak. Pak Apen dan 4 orang Tim SMART Patrol juga ikut serta dalam pelepasliaran itu. Sebelum dilepasliarkan, dilakukan pemeriksaan kondisi fisik dan berat Trenggiling. Dari hasil pemeriksaan satwa tersebut, Trenggiling diketahui dalam kondisi baik secara fisik, dengan berat 2,6 kg. Secara kasar, dari pengamatan langsung fisik dan bobot, diperkirakan usia Trenggiling tersebut masih sangat muda.

Upaya bersama para pihak dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan satwa liar dilindungi dapat menjamin keberlanjutan populasi satwa liar, termasuk pula kelestarian, keseimbangan, dan keutuhan ekosistem kawasan hutan.

Trenggiling (*Manis javanica*)
yang Dilepasliarkan Kembali
ke Habitatnya di Kawasan
Hutan di Dusun Ladak,
Desa Meragun
© Yayasan Planet Indonesia/
SMART Patrol HLGN/
Fransiskus Hendri



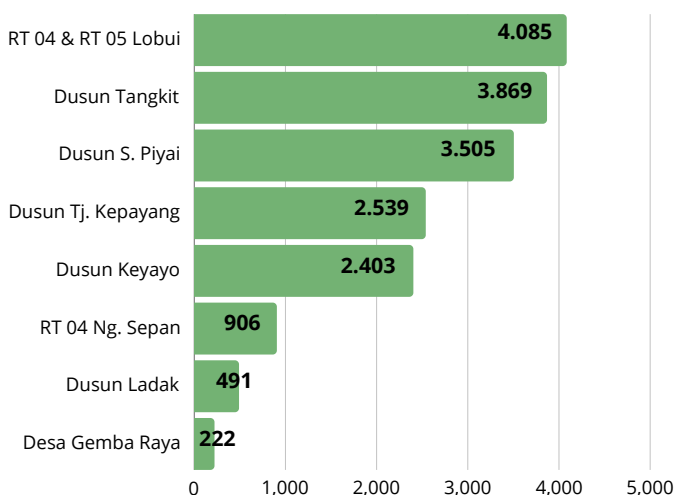
Pak Apen, Warga Dusun
Ladak yang Menyerahkan
Trenggiling sebagai Tindakan
Perlindungan Satwa Liar
Dilindungi
© Yayasan Planet Indonesia/
SMART Patrol HLGN/
Fransiskus Hendri



Menghijaukan Hamparan Ekosistem Gunung Naning: Penanaman Kawasan Terdegradasi dengan Sistem Agroforestri

Menjawab permasalahan degradasi kawasan di wilayah HLGN, YPI menginisiasi kegiatan penanaman di lahan terbuka melalui Program Agroforestri, dengan partisipasi aktif masyarakat. Menggunakan sistem agroforestri yang merupakan salah satu model pertanian yang melibatkan integrasi antara tanaman pokok semusim dengan berbagai jenis tanaman kayu atau tanaman lainnya, telah tertanam sebanyak 18.020 bibit di tahun 2023 di 8 titik lokasi desa/dusun. Sampai dengan tahun 2023 (2021-2023) telah tertanam sebanyak 73.205 tanaman di kawasan HLGN. Program penanaman agroforestri sekaligus memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk menghijaukan kembali kawasan terdegradasi.

Grafik 1. Lokasi dan detail jumlah tanaman di tahun 2023



Monitoring Tahunan
Penanaman Tahun 2021 di RT
04 Nanga Sepan, Desa Sungai
Segak, Kab. Sintang
© Yayasan Planet Indonesia

Pertumbuhan Tanaman
Pinang di Plot Agroforestri RT
04 Nanga Sepan
© Yayasan Planet Indonesia

Monitoring Tahunan Tanaman
Kakao di Dusun Ladak, Desa
Meragun, Kab. Sekadau
© Yayasan Planet Indonesia

Penyerahan secara Simbolis
Insentif Sarana Sanitasi dari
Kegiatan Agroforestri kepada
Anggota PUMK Berangin Jaya
Betung di Desa Sungai Segak
© Yayasan Planet Indonesia

Program Agroforestri juga memberikan insentif sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan penanaman. Insentif yang diterima, secara kolektif dikelola melalui badan tata kelola PUMK di masing-masing lokasi desa/dusun. Sebagian nilai insentif antara lain dipergunakan untuk pengadaan sarana sanitasi dan pembelian sarana pertanian milik bersama yang dikelola untuk usaha produktif masyarakat.

Pelayan Kesehatan Gratis untuk Masyarakat: *Membuka Akses Pemerataan Kesehatan di Pedalaman Kalbar*

Tingkat kesehatan masyarakat yang baik turut mendukung pengelolaan SDA yang berkelanjutan di kawasan konservasi/lindung. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat di kawasan dengan akses yang sulit untuk mendapatkan layanan kesehatan, dilakukan kegiatan rutin Pelayanan Kesehatan 4 bulan sekali setiap tahunnya di seluruh wilayah dampingan YPI di wilayah HLGN Sintang-Sekadau.

Kegiatan ini dilakukan dengan kerja sama antara PUMK dan Puskesmas Sekumbang dan Puskesmas Nanga Taman, serta dukungan dari pemerintah desa setempat. Di tahun 2023, sebanyak total 786 orang mendapatkan pelayanan kesehatan (509 perempuan dan 277 laki-laki) dalam pemeriksaan kesehatan gratis di 7 lokasi desa/dusun/RT di Kabupaten Sintang dan Sekadau.

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat diberikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, antara lain pemeriksaan asam urat, kolestrol, gula darah (glukosa), hemoglobin, dan tekanan darah (tensi), pengukuran berat badan dan tinggi badan, konsultasi dokter, serta pemberian obat-obatan (dengan resep dokter). Pemeriksaan kesehatan melibatkan tenaga kesehatan profesional (medis; dokter dan para medis; perawat, bidan, analis, dll.).



Pemeriksaan Kesehatan
di RT 04 Nanga Sepan,
Desa Sungai Segak
© Yayasan Planet Indonesia



Pemeriksaan Kesehatan di
Dusun Tanjung Kepayang,
Desa Nanga Pari
© Yayasan Planet Indonesia

Pelatihan Monitoring Penyu:

Menguasai Strategi Konservasi untuk Masa Depan Penyu

YPI berfokus juga pada konservasi penyu di Kalimantan Barat. Salah satu wilayah kami adalah kawasan konservasi Cagar Alam Laut (CAL) Kepulauan Karimata yang berada dalam wilayah pengelolaan BKSDA Kalbar, khususnya SKW I Ketapang.

Survei awal pada tahun 2022 bersama dengan masyarakat di 2 desa, yaitu Desa Padang dan Desa Betok, yang berada dalam kawasan, dilakukan melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), dan diperoleh ada 2 jenis penyu yang sering dijumpai oleh masyarakat atau yang naik bertelur ke pantai, yaitu Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*). Kedua penyu ini memiliki musim puncak peneluran antara bulan April–Juni. Kemudian ada beberapa pulau atau pantai yang juga teridentifikasi sebagai lokasi peneluran penyu berdasarkan hasil wawancara, antara lain Pulau Bentangor, Pulau Gosong, Pulau Buluh, Pulau Serong Gading, dan Pulau Genting. Selain data informasi jenis dan lokasi peneluran, data informasi ancaman juga diperoleh, dimana penyu yang ada di CAL Kepulauan Karimata masih dimanfaatkan masyarakat untuk mata pencaharian dan juga konsumsi pribadi (telur penyu).

Dalam rangka penguatan strategi konservasi penyu, pada Agustus 2023 YPI memberikan pelatihan monitoring penyu kepada 20 orang, yang terdiri dari 7 orang masyarakat desa, 4 orang SKW I Ketapang, dan 9 orang staf YPI. Pada pelatihan tersebut YPI secara khusus mengundang Ir. Budi Suriansyah, M. Hut sebagai pemateri utama, yang merupakan salah satu ahli dalam bidang monitoring penyu yang sudah memiliki jam terbang yang cukup lama. Peserta pelatihan dilatih dengan beberapa materi, yaitu 1) memahami startegi dan konsep nasional tentang konservasi penyu yang harus diimplementasikan di lapangan; 2) teknik monitoring penyu; 3) teknik monitoring penentuan habitat penyu; 4) teknik relokasi telur penyu ke sarang semi alami; dan 5) strategi pencegahan terhadap predator penyu. Di akhir kegiatan pelatihan, ada 11 pulau prioritas di kawasan CAL Kepulauan Karimata yang disepakati untuk dimonitoring secara rutin oleh Tim Monitoring Penyu bersama BKSDA Kalbar.

Dalam upaya perlindungan (konservasi) penyu sebagai satwa yang dilindungi, melalui pendampingan YPI, dilakukan pendataan serta pengawasan oleh Tim SMART Patrol, yang mencakup dua kategori penting, yaitu aktivitas manusia dan satwa liar. Data temuan satwa liar mengkhhususkan pada beberapa spesies kunci, dan salah satunya adalah pada jenis penyu. Data yang kami miliki selama periode September 2022 sampai dengan Juni 2023 memberikan beberapa informasi yang terbagi dalam 2 kategori yaitu:

1. Tanda Satwa berupa 44 bekas sarang, 11 sisa cangkang telur Penyu Sisik, dan 5 tapak/jejak penyu.
2. Perjumpaan Satwa sebanyak 3 kali (1 ekor Penyu Hijau dan 2 ekor Penyu Sisik).



Perjumpaan Penyu Sisik di pesisir Tanjung Ru, Desa Padang
© Yayasan Planet Indonesia/
Tim SMART Patrol CAL Kepulauan Karimata/Gunawan

Pengarahan Praktek Lapangan Profiling Habitat Potensi Peneluran Penyu di Sepanjang Pesisir Pantai
© Yayasan Planet Indonesia/
Rodiansyah



Tukik Penyu Hijau
(*Chelonia mydas*)
© Lia Syafitri

Perkembangan PUMK:

Memperluas Jejak Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Baru

Pada tahun 2023, telah dikembangkan 3 Kelompok PUMK di wilayah baru, yaitu di wilayah HLGN di Kabupaten Ketapang dan wilayah CAGN di Kabupaten Bengkayang. Antara lain PUMK Beginci Jaya (Desa Beginci Jaya) dan PUMK Tabuh Gurung Abang (Desa Kenyabur), Kecamatan Hulu Sungai di Kabupaten Ketapang, dan PUMK Sinoei Bertumbuh (Desa Suti), Kecamatan Suti Semarang di Kabupaten Bengkayang.

Kelompok PUMK ini dilengkapi dengan struktur yang mencakup:

- Badan Pengawas yang terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat;
- Badan Pengurus Harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;
- Kelompok Kerja (Pokja).

Adapun Pokja yang dibentuk di 2 PUMK di wilayah HLGN Kabupaten Ketapang, antara lain Pokja Dana Ketahanan, Pokja Keluarga Sehat, Pokja Pertanian Berkelanjutan, dan Pokja Literasi. Sedangkan Pokja yang dibentuk di 1 PUMK di wilayah CAGN Kabupaten Bengkayang antara lain Pokja Dana Ketahanan, Pokja Keluarga Sehat, dan Pokja Pertanian Berkelanjutan.

Pada ketiga PUMK di wilayah baru tersebut juga sudah dilakukan Pelatihan Dasar (Peldas) PUMK yang menandakan Kelompok PUMK sudah resmi terbentuk untuk kemudian mendapatkan pendampingan dan fasilitasi dari YPI dalam menjalankan aktivitas-aktivitas sesuai pokja yang sudah dibentuk di masing-masing badan tata kelola PUMK.

Sampai dengan tahun 2023, sudah terbentuk sebanyak total 38 PUMK di 4 lanskap (CAGN, HLGN, Kubu Raya, dan CAL Kepulauan Karimata) dimana YPI bekerja, melingkupi 7 kabupaten dan 27 desa di Kalimantan Barat, dengan total Anggota PUMK sebanyak 3.592 orang.



Peldas PUMK Tabuh Gurung
Abang di Desa Kenyabur,
Kecamatan Hulu Sungai,
Kabupaten Ketapang
© Yayasan Planet Indonesia/
Setiawan

Perkuat Kemandirian PUMK:

Iuran Dana Partisipatif sebagai Bagian dari Komitmen Anggota

Pada tahun 2023, Program Dana Ketahanan mengumumkan peluncuran kegiatan baru yang dikenal sebagai Iuran Dana Partisipatif di PUMK Beginci Jaya dan PUMK Tabuh Gurung Abang, wilayah HLGK Ketapang. Kegiatan ini diperkenalkan sebagai salah satu indikator komitmen anggota untuk mendukung kelancaran organisasi yang dimiliki bersama. Melalui pengumpulan iuran dari anggota setiap periode yang telah ditetapkan, kelompok bertujuan untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, termasuk konsumsi dalam pertemuan, transportasi, peralatan kantor, serta pengelolaan kegiatan lainnya.

Penerapan Iuran Dana Partisipatif ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemandirian dan keberlanjutan PUMK di dua wilayah tersebut. Anggota kelompok menunjukkan kesediaan mereka untuk secara aktif berpartisipasi dalam mendukung kegiatan organisasi, menandakan semangat kolaboratif dan tanggung jawab bersama dalam membangun komunitas yang lebih kuat dan mandiri secara finansial.

Diharapkan bahwa melalui kontribusi finansial ini, PUMK Beginci Jaya dan PUMK Tabuh Gurung Abang dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya, serta masyarakat sekitarnya. Langkah ini juga memperkuat ikatan antar anggota kelompok, membangun kepercayaan, dan meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuan bersama dalam mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial di wilayah mereka.



Simulasi Pemeriksaan *Cash on Hand* oleh Pengawas PUMK pada Kegiatan Pelatihan Pembukuan Dasar yang Didampingi oleh *Field Facilitator* (FF) dan *Community Finance Technical Assistance*, Agustus 2023 di Kecamatan Sandai.
© Yayasan Planet Indonesia/
Hanna Adelia Runtu

Media Gathering:

Dukungan Media Massa dalam Upaya Perlindungan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Kalimantan Barat

Pada bulan Agustus 2023, melalui dukungan dan kerja sama dengan BKSDA Kalbar, diselenggarakan agenda temu jurnalis '*Media Gathering*' di Kubu Raya. Agenda ini dilakukan untuk meningkatkan upaya perlindungan dan peredaran TSL di Kalimantan Barat, dengan dukungan media massa.

Kegiatan diisi dengan pemaparan materi dari (1) Balai KSDA Kalbar yang disampaikan oleh Kepala Balai RM. Wiwied Widodo, S.Hut, M.Sc, (2) Jurnalis Senior oleh Andi Fachrizal, (3) YPI oleh drh. Happy Ferdiansyah, dan (4) Akademisi dari Pusat Pengkajian Islam Universitas Nasional (PPI – UNAS) oleh Dr. Fachruddin Majeri Mangunjaya.

Sebanyak 20 jurnalis lintas platform (*online* dan *offline*) hadir dalam acara ini. Media massa berperan penting dalam penyebaran informasi terkait konservasi satwa liar, khususnya dalam hal pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan dan peredaran TSL dilindungi dan tidak dilindungi melalui pemberitaan media (*media reporting*). Pemberitaan sebagai salah satu strategi untuk membangun kesadaran (*awareness*) publik, sebagai media edukasi yang kemudian dapat mempengaruhi atau menciptakan perubahan perilaku dalam rangka mendukung perlindungan TSL oleh masyarakat secara luas, termasuk untuk meningkatkan efektivitas upaya penegakan hukum oleh para pihak terkait, serta mempengaruhi kebijakan dalam peredaran dan perlindungan TSL dilindungi.

Di Indonesia perlindungan TSL diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Secara internasional, status perlindungan dan peredaran TSL diatur dalam Daftar Merah IUCN (*The International Union for Conservation of Nature's Red List of Threatened Species*) dan CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

Dari kegiatan *Media Gathering* ini dihasilkan sebanyak 25 liputan media (*media coverage*). Dengan adanya peningkatan pemberitaan media, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas upaya perlindungan TSL yang dilakukan oleh para pihak terkait secara sinergis, khususnya melalui penegakan hukum. BKSDA Kalbar, YPI, UNAS, dan jurnalis bersepakat untuk mengutamakan isu-isu perlindungan TSL melalui pemberitaan media. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para pihak terkait pula, baik dalam hal keterbukaan akses informasi yang akurat dari narasumber kompeten, maupun pelibatan media dalam peliputan berbagai kasus kejahatan satwa liar, dan penguatan jaringan melalui agenda-agenda temu jurnalis lainnya.



Narasumber Media Gathering
© Yayasan Planet Indonesia/
Lia Syafitri

Ngobras - Ngobrol Santai Para Pihak:

Penguatan Para Pihak dan Jasa Ekspedisi dalam Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL)

YPI berkomitmen dalam pengendalian dan pengawasan peredaran TSL, yang dalam hal ini membutuhkan kerja sama dan dukungan para pihak terkait, khususnya dalam upaya penegakan hukum dan memberantas perdagangan ilegal satwa liar di Kalimantan Barat. Pada bulan Agustus 2023 digelar pertemuan dengan para pihak melalui acara 'Ngobras - Ngobrol Santai bersama Para Pihak dalam Peredaran TSL' di Pontianak. Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk membangun upaya bersama dalam menurunkan peredaran TSL melalui upaya penegakan hukum, penerapan regulasi, serta mengoptimalkan fungsi lembaga otoritas, dan pelibatan jasa ekspedisi.

Dalam prakteknya, kasus-kasus ilegal perdagangan satwa liar saat ini dilakukan secara lebih masif dan terorganisir melalui perdagangan (jual-beli) online, dimana proses pengirimannya melalui berbagai jasa ekspedisi, baik di dalam maupun keluar Kalimantan Barat. Hal itulah yang mendasari penting untuk dilakukannya pengawasan lalu lintas barang melalui jalur ekspedisi, dan tentunya memerlukan dukungan, keterlibatan/partisipasi, dan kolaborasi para pihak, khususnya bersama lembaga otoritas dan jasa ekspedisi, yang mendukung upaya pengendalian dan pengawasan peredaran TSL dalam rangka penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan ilegal satwa liar.

Instansi kunci pemerintah meliputi BKSDA Kalbar, Balai Karantina Pertanian Pontianak dan Entikong, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dalam hal ini Balai GAKKUM KLHK Wilayah Kalimantan Seksi III Pontianak. Sedangkan dari jasa ekspedisi sebagai instansi kunci yakni *Regulated Agent* yang diwakili oleh PT. Borneo Trans Mandiri yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan. Dari proses pemaparan materi 4 narasumber kunci dan proses diskusi antar lembaga/instansi yang terlibat, dihasilkan nota kesepahaman dan kesepakatan yang memuat adanya penyegaran terhadap aturan yang ada untuk menghindari peredaran TSL ilegal melalui ekspedisi tertentu. Disepakati juga adanya kelompok kerja kecil yang memiliki representatif dari setiap lembaga untuk mengawal peredaran TSL melalui jasa ekspedisi, serta keterbukaan informasi melalui portal online untuk dapat melihat perkembangan aturan terkait perlindungan TSL.

Pertemuan ini dihadiri oleh sebanyak 63 peserta, 23 orang diantaranya adalah dari 19 jasa ekspedisi di Kalimantan Barat. Pertemuan para pihak ini menjadi momentum penting dalam mensinergikan kerja-kerja bersama ke depannya. Harapan ke depan, bahwa pengendalian dan pengawasan peredaran TSL dapat ditingkatkan melalui tata kelola yang baik oleh berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.



Para Pihak; Lembaga Otoritas dan Jasa Ekspedisi
© Yayasan Planet Indonesia/
Lia Syafitri

Pelepasliaran Burung Berkicau: Upaya Konservasi Ek-Situ

YPI melalui Program Pusat Penyelamatan Burung Berkicau (P2B2), melakukan proses penyelamatan satwa dengan memberikan dukungan kepada pemerintah terkait seperti BKSDA Kalbar dan Karantina Pertanian dalam proses penyelamatan (*rescue*), proses rehabilitasi, dan proses pelepasliaran (*release*), yang utamanya difokuskan pada spesies kunci aves jenis *passerine* (burung berkicau).

Semenjak diresmikannya fasilitas P2B2 pada tanggal 6 Juni 2022, yang merupakan pusat rehabilitasi khusus burung berkicau satu satunya di Indonesia, P2B2 aktif melakukan kegiatan *rescue* bersama BKSDA Kalbar dan melakukan proses karantina, tindakan medis, proses rehabilitasi, dan *release* satwa.

Sesuai prosedur operasional standar (SOP), pada bulan Desember 2023, YPI dan Tim P2B2 bersama BKSDA Kalbar melakukan proses pelepasliaran 9 ekor burung berkicau di lokasi pelepasliaran yang sesuai di Dusun Dawar, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang. Pelepasliaran dihadiri oleh camat, kepala desa, perwakilan adat, dan perwakilan patroli hutan masyarakat. Pada hari pelepasliaran tim gabungan bersama dengan pemangku wilayah melaksanakan seremonial pelepasliaran satwa sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga keharmonisan antara masyarakat dan satwa liar yang hidup berdampingan. Dengan adanya proses penyelamatan dan pelepasliaran ini, diharapkan akan menjadi tonggak awal dalam pelaksanaan pelepasliaran selanjutnya di wilayah administrasi terkait.

Sebelum proses pelepasliaran, tim gabungan antara YPI dan BKSDA Kalbar melaksanakan proses habituasi pada lokasi *release* dengan membangun kandang sementara dan melakukan translokasi terhadap satwa siap *release* ke lokasi pelepasliaran untuk dilakukan habituasi pada kandang sementara. Proses habituasi dalam kandang sementara dilakukan selama seminggu untuk memastikan burung dapat dilepaskan dengan baik setelah penyesuaian kondisi dengan alam sekitarnya.



Cica-Daun Besar/Cucak Hijau (*Chloropsis sonnerati*) -
Salah Satu Jenis Burung Berkicau yang Dilepasliarkan
© Yayasan Planet Indonesia/Happy Ferdiansyah



Tim Gabungan Pelepasliaran bersama Para Pihak
yang Mendukung di Tingkat Kecamatan dan Desa
© Yayasan Planet Indonesia



SOP penyelamatan hingga pelepasliaran satwa memuat tahapan alur standar yang harus dipenuhi dengan kurun waktu dan kriteria tertentu, antara lain (*Lampiran 1*): Prose Karantina Satwa, Proses Rehabilitasi, Proses Habitulasi, Proses Pelepasliaran (*Release*), dan Proses Pemantauan Pasca *Release*.

Proses pelepasliaran terutama untuk burung berkicau merupakan suatu hal yang baru, baik di pemerintahan maupun di non pemerintahan, sehingga kajian terkait lokasi kesesuaian habitat untuk pelepasliaran burung berkicau masih sedikit saat ini. Oleh karena itu YPI melalui P2B2, dalam proses pelepasliaran, mengajukan permohonan kepada pemerintah (BKSDA Kalbar) terkait rekomendasi satwa siap *release* dan lokasi pelepasliarannya. Setelah pengajuan diterima kemudian dilaksanakan *ground check* (pengecekan lapangan) pada lokasi yang direkomendasikan. Setelah memastikan kesesuaian habitat di lapangan, tim berkoordinasi dengan seluruh pemangku wilayah terkait yang melibatkan kecamatan, kepala desa, pemangku adat, dan perwakilan patroli masyarakat, untuk memastikan lokasi pelepasliaran sesuai dengan kriteria untuk menghindari gesekan sosial-budaya di masyarakat dan sebagai pengingat kepada masyarakat untuk tidak melakukan perburuan pasca *release*.



Total sebanyak 75 ekor burung berkicau sudah dilepasliarkan sepanjang tahun 2023. YPI dan Tim P2B2 juga terlibat dalam 3 kali proses pelepasliaran yang dilakukan oleh BKSDA Kalbar sepanjang tahun 2023 pada bulan Juli dan Agustus.

Ke depannya YPI akan melakukan kajian lanjutan terhadap lokasi-lokasi pelepasliaran khususnya pada jenis burung burung berkicau baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi, karena sejauh ini kajian-kajian terhadap lokasi pelepasliaran burung berkicau dengan mempertimbangkan kesesuaian habitat masih belum banyak tersedia jika dibandingkan dengan jenis yang sudah menjadi perhatian sejak lama seperti mamalia (orangutan, trenggiling, dll).

Kegiatan dan Pendampingan Rutin Program

PENGORGANISASIAN

- Pertemuan Rutin Pengurus
- Pendampingan *Community Mobilizer* (CM)
- Penilaian Perjalanan BTKT (*Roadmap*)

SMART PATROL

- Patroli Rutin
- Peningkatan Kapasitas: Pelatihan GPS, dll.
- Umpan Balik dan Evaluasi
- Fire Free Village; Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

DANA KETAHANAN

- Pelayanan Simpan-Pinjam
- Dukungan Usaha Produktif
- Iuran Dana Partisipatif

CLIMATE SMART AGRICULTURE

- Peningkatan Kapasitas; Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik dan Pestisida Nabati, dll.
- Monitoring Pendampingan Petani
- Agroforestri; Penanaman, Pembibitan, Monitoring Penanaman, dll.
- Program Pertukaran Senjata

LITERASI

- Rekrutmen Tutor
- Pelatihan Tutor
- Pendaftaran Peserta Literasi
- Pembelajaran Peserta Literasi
- Ujian Peserta Literasi



PERIKANAN BERKELANJUTAN

- Monitoring Perikanan
- Buka Tutup Sungai (*Temporary Closure*)
- Zona Inti (*Permanent Closure*)

BIODIVERSITAS

- Survei Kelimpahan Satwa Liar dengan *Line Transect*
- Survei Satwa Liar dengan Kamera Jebak
- Pengamatan Berbiak Enggang Gading

KONSERVASI EK-SITU

- Kampanye Perubahan Perilaku
- Perlindungan, Penyelamatan dan Pelepasliaran Burung Berkicau

PERHUTANAN SOSIAL

- Kemitraan Konservasi
- Peningkatan Kapasitas Pengurus LDPH
- Pendampingan KUPS
- Fasilitasi Pembentukan KUPS
- Pendampingan Penyusunan RKPS dan RKT

KELUARGA SEHAT

- Pelayanan Kesehatan
- Kunjungan Rumah Tangga (Keluarga Dampingan)
- Penyuluhan Kesehatan
- Pelatihan Dasar Kader KS
- Pelatihan Keterampilan (Tematik) Kader KS







*Komunikasi Visual Menggunakan Kekuatan Elemen Visual untuk Menyampaikan Pesan, Menginspirasi Perubahan, atau Membangkitkan Emosi.
© Planet Indonesia/Justin Grubb*

Cerita Komunikasi

Peringatan Hari Keanekaragaman Hayati 2023:

*Partisipasi Konservasi Keanekaragaman Hayati di Ruang Diskusi Internasional
"Global Biodiversity Festival"*



Live Streaming Youtube
Global Bio Fest 2023
bersama Manajer Teknis
YPI, Rodiansyah

Global Biodiversity Festival adalah acara tahunan yang dilaksanakan untuk memperingati hari keanekaragaman hayati setiap tanggal 22 Mei. Sampai tahun 2023 acara ini telah memasuki tahun ke-4 sejak tahun 2020. Acara ini dihelat untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan konservasi kepada banyak orang di seluruh dunia. Pada tahun 2023, YPI mendapatkan kesempatan untuk mengambil peran menjadi pembicara dalam gelaran internasional tersebut.

Manajer Teknis YPI, Rodiansyah menjadi pembicara melalui *live streaming Youtube* selama 30 menit. Dalam waktu tersebut sebanyak 15 menit dialokasikan untuk menyampaikan presentasi dan 15 menit berikutnya adalah diskusi dan tanya-jawab dari audiens yang menonton live. Sebelum *streaming* dimulai ada banyak persiapan yang harus dilakukan bersama Joe Grabowski selaku pembawa acara. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2020, Global Biodiversity Festival telah menyuguhkan konten langsung selama 158 jam, melibatkan 321 pembicara dari 81 negara yang berbeda.

Saat ini kita sedang berjuang untuk menghentikan kepunahan terhadap keanekaragaman hayati. Pada tahun ini merupakan kesempatan untuk merayakan serta meningkatkan kesadaran tentang upaya penting yang dilakukan di seluruh dunia oleh individu dan tim yang penuh semangat, pengetahuan, dan dedikasi yang membuat festival ini menjadi lebih penting dari festival sebelumnya. Semua ini tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan harapan akan masa depan keanekaragaman hayati yang lebih baik.

Pelatihan Video Partisipatif 'Kisah Kubu Raya': Merekam Kisah Masyarakat, Budaya, dan Konservasi Wilayah Pesisir

Untuk mengkomunikasikan masalah, kebutuhan, dan keprihatinan, serta mendukung kepemimpinan lokal dan menciptakan platform (tempat) untuk berdialog di masyarakat, YPI melakukan peningkatan kapasitas untuk masyarakat di lokasi dampingan di Kubu Raya dengan metode video partisipatif.

Proyek video partisipatif ini diberi nama 'Kisah Kubu Raya'. Kegiatan lokakarya dan pelatihan dilakukan selama 5 hari pada bulan November 2023, yang diikuti secara antusias oleh 8 orang peserta dari 3 desa, yaitu Desa Mengkalang Jambu, Desa Seruat Dua, dan Desa Dabong. Pelatihan difasilitasi oleh Amber Carter, seorang mahasiswi S3 Universitas Edinburgh dari Inggris yang secara khusus melakukan studi menggunakan metode video partisipatif. Kegiatan ini dilakukan untuk mendokumentasikan dan berbagi pengetahuan dan persepsi lokal tentang isu/permasalahan sosial-ekonomi dan lingkungan laut/pesisir yang kritis, serta meningkatkan keterampilan masyarakat untuk menggunakan metode pembuatan film (*filmmaking*) dan bercerita dalam pengelolaan bersama sumber daya alam, juga dalam mengadvokasi hak-hak dan kebutuhan mereka.

Pelatihan terbagi menjadi 3 tahapan/proses, yaitu: 1) Pelatihan/Workshop dan Pra Produksi (teknik dasar videografi/*camera skill*, teknik wawancara, dan pengembangan cerita); 2) Produksi (*shooting/filming*); dan 3) Pasca Produksi (*editing*). Seluruh proses tersebut dilakukan oleh peserta didampingi oleh staf dan voluntir dari YPI selaku fasilitator.

Output dari proyek video partisipatif ini adalah dihasilkannya 3 buah film pendek berdurasi 5-9 menit, antara lain:

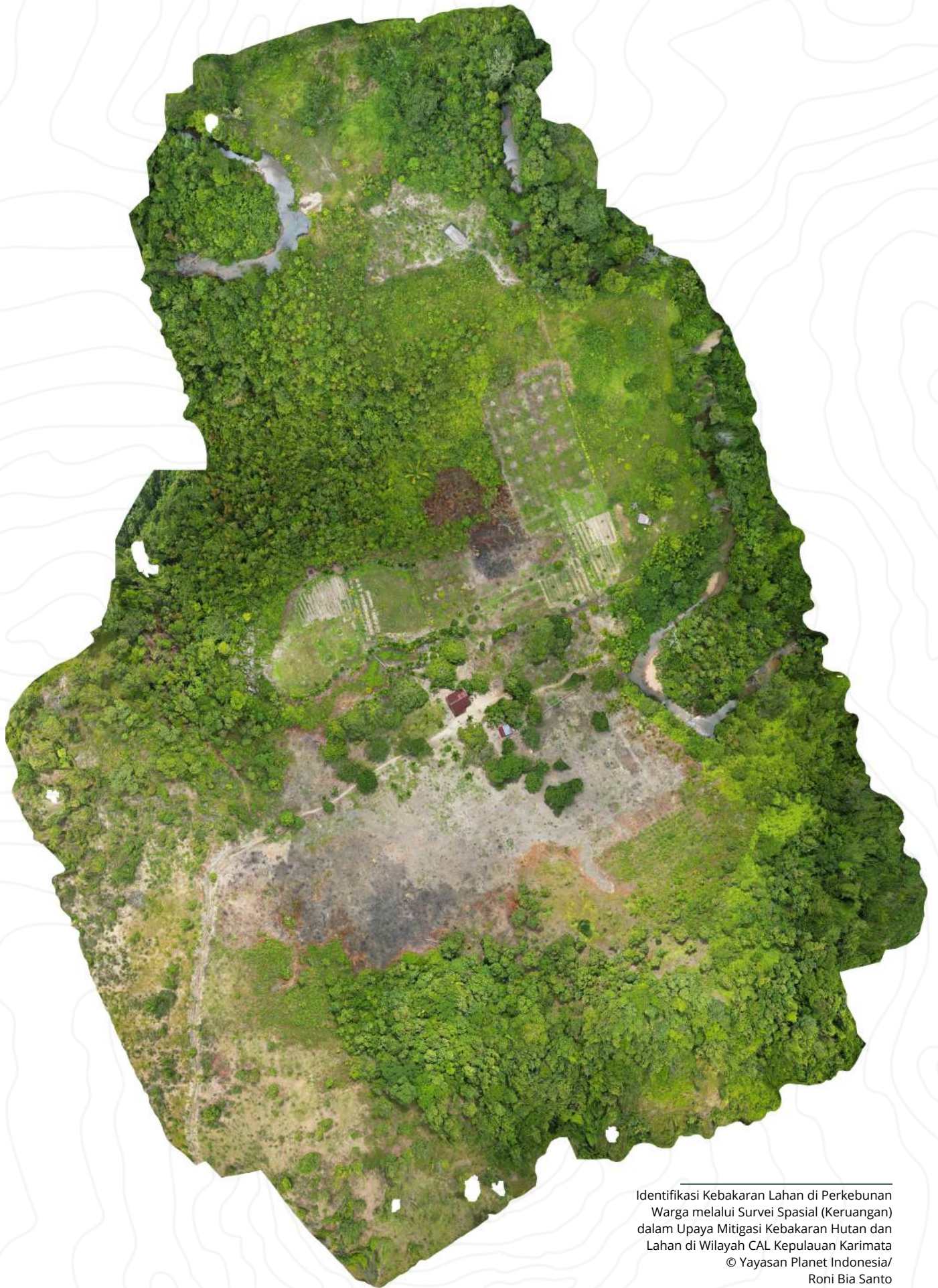
1. Harapan Petani, Desa Seruat Dua (durasi: 9:19 menit)
2. Lubuk Gong, Desa Mengkalang Jambu (durasi 6:19 menit)
3. Cerita Perikanan dari Desa Dabong, Desa Dabong (durasi: 5:02 menit)

Ketiga film tersebut juga diputar dan ditonton bersama di masing-masing desa yang berpartisipasi. Masyarakat dan pihak desa sangat menyambut baik dilakukannya kegiatan pelatihan video dan pemutaran film ini.

Mode keterlibatan visual dan lisan dapat mendorong kelompok-kelompok yang terpinggirkan (marjinal) untuk berkontribusi, mendokumentasikan pengetahuan dan suara masyarakat yang seringkali tidak terwakili dalam ruang pengambilan keputusan.



Tim Fasilitator
dan Peserta
'Kisah Kubu Raya'
© Yayasan Planet
Indonesia/
Roni Bia Santo



Identifikasi Kebakaran Lahan di Perkebunan
Warga melalui Survei Spasial (Keruangan)
dalam Upaya Mitigasi Kebakaran Hutan dan
Lahan di Wilayah CAL Kepulauan Karimata
© Yayasan Planet Indonesia/
Roni Bia Santo

TANTANGAN

Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap pendekatan dan program kegiatan yang dimiliki oleh YPI menjadi penghalang serius dalam upaya kolaborasi antara pemerintah desa dan badan tata kelola PUMK. Faktor ini sebagian besar disebabkan oleh minimnya keterbukaan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa kepada pihak-pihak eksternal seperti YPI. Tanpa pemahaman yang cukup, kerja sama antara pemerintah desa dan YPI menjadi sulit dilakukan dan memperlambat potensi perubahan positif yang dapat dicapai melalui sinergi di antara keduanya. Koordinasi dengan lembaga pendamping lain di desa menjadi kunci. Kolaborasi yang solid antara berbagai lembaga pendamping akan membuka pintu bagi peluang kerja sama yang saling menguntungkan, tanpa merugikan pihak mana pun dalam pencapaian tujuan masing-masing. Melalui sinergi yang kuat dan pemahaman yang lebih baik tentang visi dan misi masing-masing pihak, potensi untuk menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat desa dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Beberapa mitra kesulitan dalam memahami model inti YPI dan pendekatan PUMK, menyebabkan kesulitan dalam mengkontekstualisasikan konsep tersebut dalam implementasi di lapangan. Akibatnya, masih banyak anggapan bahwa PUMK hanya berkaitan dengan aspek praktis seperti simpan-pinjam, pembukuan, administrasi keuangan, dan tabungan. Namun, pada kenyataannya, PUMK merupakan pendekatan yang lebih holistik, mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses ke modal usaha, pengembangan keterampilan, pembangunan jaringan sosial, dan peningkatan kapasitas untuk mengelola keuangan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para mitra dan pemerintah, agar mereka dapat mengaplikasikan pendekatan PUMK secara tepat sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

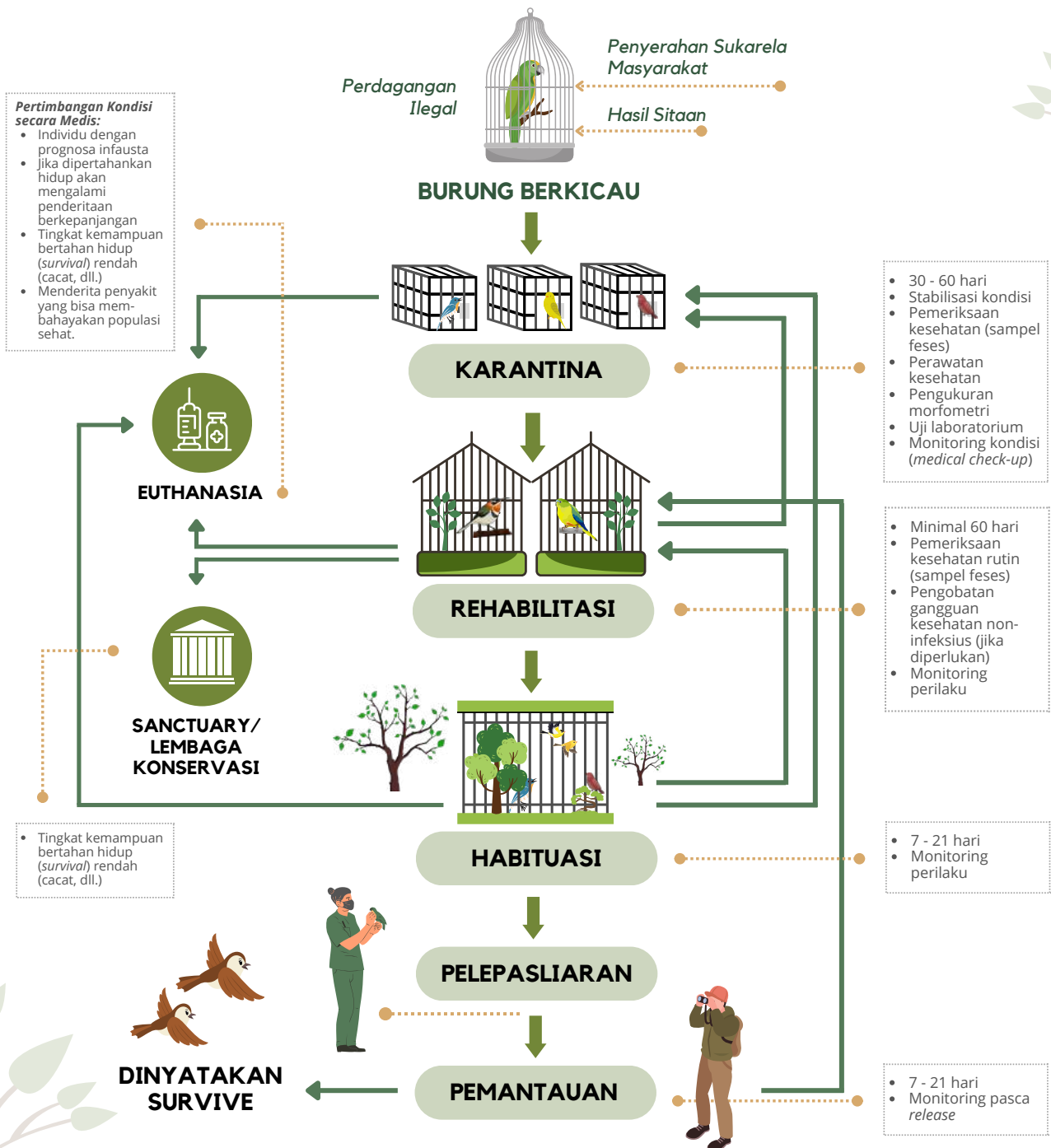
Kompleksitas hubungan antara masyarakat yang tinggal di Kepulauan Karimata - sebuah kawasan Cagar Alam Laut - dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya merupakan tantangan yang signifikan. Masyarakat merasa terpinggirkan dan diatur, sehingga upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi menjadi sulit karena kurangnya keterlibatan kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan wilayah perairan yang ramah dan berkelanjutan. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang perlu diambil adalah membangun forum komunikasi yang inklusif dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Forum tersebut akan memberikan wadah bagi semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi, dan merencanakan langkah-langkah konkret dalam upaya pengelolaan yang berkelanjutan. Melalui dialog terbuka dan kolaboratif, diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik, serta komitmen yang kuat untuk melindungi dan menjaga kawasan Cagar Alam Laut Karimata demi kesejahteraan bersama dan masa depan yang berkelanjutan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alur Penanganan Burung Berkicau dari Perdagangan Ilegal atau Penyerahan Sukarela Masyarakat



**WAK GATAK
CONSERVATION
CENTER**



Lampiran 2. Penerima Manfaat Program In-Situ Yayasan Planet Indonesia

Desa	Penerima Manfaat					
	Badan Tata Kelola	Dana Ketahanan	Keluarga Sehat	Literasi	Pertanian Berkelanjutan	Perikanan
Pisak	248	248	354	9	359	-
Bengkawan	49	49	51	8	20	-
Engkangin	322	322	345	181	310	-
Bentiang	81	81	122	15	51	-
Tengon	142	142	187	31	74	-
Dange Aji	71	71	89	19	32	-
Sahan	168	168	194	21	63	-
Bengkilu	176	176	225	3	234	-
Cempaka Putih	153	153	131	-	37	-
Suti	63	-	-	-	-	-
Sungai Nibung	174	174	230	161	-	332
Seruat Dua	310	310	452	118	-	-
Kuala Karang	-	-	-	-	-	386
Mengkalang Jambu	167	167	205	74	-	-
Mengkalang	144	144	411	98	-	-
Dabong	155	155	497	-	-	318
Tanjung Harapan	165	165	-	-	-	125
Sungai Segak	109	109	48	-	92	-
Nanga Pari	131	131	109	-	99	-
Meragun	175	175	71	-	107	-
Pantok	101	101	61	-	62	-
Beginci Darat	126	126	80	-	38	-
Kenyabur	92	92	88	-	33	-
Betok Jaya	95	95				542
Padang	97	97				1032

Lampiran 3. Pelaksana Program In-situ Yayasan Planet Indonesia

Desa	Pelaksana						
	Pengurus Badan Tata Kelola	Pokja Dana Ketahanan	Kader Keluarga Sehat	Tutor Literasi	Petani Penggerak Pertanian	Enumerator Perikanan	Anggota Monitoring dan Patroli
Pisak	3	3	22	2	8	-	4
Bengkawan	2	1	-	1	4	-	6
Engkangin	6	5	14	6	6	-	5
Bentiang	3	2	11	-	2	-	-
Tengon	6	6	10	3	5	-	4
Dange Aji	3	3	4	1	3	-	18
Sahan	6	6	13	4	8	-	-
Bengkilu	3	2	13	-	5	-	4
Cempaka Putih	2	3	21	-	4	-	-
Suti	5	2	8	-	8	-	-
Sungai Nibung	13	5	18	1	-	6	7
Seruat Dua	16	5	21	5	-	-	12
Kuala Karang	7	1	4	-	-	6	-
Mengkalang Jambu	8	3	7	3	-	-	6
Mengkalang	8	-	14	1	-	-	6
Dabong	10	6	20	-	-	2	-
Tanjung Harapan	4	1	4	-	-	2	-
Sungai Segak	11	4	-	-	2	-	4
Nanga Pari	15	4	1	-	3	-	4
Meragun	8	2	-	-	3	-	4
Pantok	8	4	-	-	3	-	4
Beginci Darat	19	2	4	-	5	-	-
Kenyabur	19	2	5	-	6	-	-
Betok Jaya	12	3				9	13
Padang	10	5				1	13

Lampiran 4. Capaian Hasil Program In-situ Yayasan Planet Indonesia

Desa	Capaian Hasil						
	Kemandirian Badan Tata Kelola	Dana Ketahanan Jumlah Aset dan Persen Peningkatan Aset	Keluarga Sehat Pelayanan dan Penyuluhan	Peserta Lulus Literasi	Pertanian Jumlah Komoditas Pertanian	Perikanan Jumlah Jenis Tangkapan yang Dimonitoring	Tim Monitoring dan Patroli Luas Hutan atau Laut yang Dijangkau
Pisak	82%	340,270,769 (+133.01%)	4	-	39	-	4,700
Bengkawan	88%	116,962,900 (+2.57%)	-	-	10	-	7,300
Engkangin	77%	414,512,976 (+103.47%)	7	90	14	-	5,000
Bentiang	62%	132,526,000 (+133.01%)	-	-	8	-	-
Tengon	76%	158,610,700 (+128.12%)	3	-	13	-	-
Dange Aji	86%	59,766,128 (+7.61%)	4	-	2	-	-
Sahan	575	280,050,000 (+474.45%)	4	-	26	-	-
Bengkilu	70%	185,714,500 (+73.26%)	2	-	32	-	-
Cempaka Putih	66%	157,746,774 (+12.98%)	4	-	1	-	-
Suti	-	-	-	-	-	-	-
Sungai Nibung	-	393,683,616 (6.9%)	1	206	-	78	3,866
Seruat Dua	-	433,538,902 (206.67%)	2	51	-	-	643
Kuala Karang	-	-	-	-	-	73	-
Mengkalang Jambu	-	295,569,447.59 (54.96%)	3	43	-	-	3,071
Mengkalang	-	152,485,599 (22.51%)	2	67	-	-	1,725
Dabong	-	286,677,192 (691.34%)	5	-	-	57	-
Tanjung Harapan	-	89,390,000 (1294.54%)	1	-	-	13	-
Sungai Segak	49%	72,929,280 (52.72%)	4	-	38	-	8,800
Nanga Pari	53.5%	87,053,800 (82.56%)	5	-	19	-	8,700
Meragun	60%	177,074,300.00 (24%)	2	-	10	-	7,300
Pantok	39%	25,845,000 (120.43%)	10	-	8	-	9,400
Beginci Darat	-	14,235,000.00 (33.54%)	2	-	5	-	-
Kenyabur	-	9,565,000 (12.27%)	2	-	5	-	-
Betok Jaya	-	32,041,930 (320.54%)		-	-	130	23,977
Padang	-	27,080,000 (80.23%)		-	-	130	41,095

Lampiran 4. Daftar Lembaga Desa Pengelola Hutan yang Didampingi

No	Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama LDPH	Jumlah Anggota
1	HLGN	Sintang	Sepauk	Temawang Bulai	Temawang Bulai	10
2	HLGN	Sekadau	Nanga Taman	Pantok	Pulau Tujoh	14
3	HLGN	Sekadau	Nanga Mahap	Karang Betung	Doik Manik	14
4	CAGN	Landak	Air Besar	Dange Aji	Dange Aji	15
5	HLSPT	Kubu Raya	Teluk Pakedai	Sungai Nibung	Sungai Nibung	17
6	HLSPT	Kubu Raya	Kubu	Mengkalang Jambu	Mengkalang Jambu	18
7	HLSPT	Kubu Raya	Kubu	Seruat Dua	Seruat Dua	17
8	HLSPT	Kubu Raya	Kubu	Mengkalang	Mengkalang	13
9	HLPT	Kubu Raya	Batu Ampar	Tanjung Harapan	Tanjung Harapan	26

Lampiran 5. Daftar Jumlah Burung yang Direhabilitasi di Pusat Penyelamatan Satwa Wak Gatak

Kuartal	Jumlah Burung	Jumlah Rehab	Jumlah Karantina	Jumlah Release
1	36	6	30	0
2	81	9	72	0
3	115	56	59	66
4	79	47	32	9

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tersusunnya **Laporan Tahunan 2023** ini, Yayasan Planet Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap pihak, baik yang terlibat maupun mendukung dalam segala aspek implementasi, proses, dan capaian dari kegiatan dan kerja konservasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh wilayah kerja YPI, mulai dari masyarakat, pemerintah desa/dusun/RT, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dinas terkait, hingga pemangku wilayah.

PEMANGKU WILAYAH KONSERVASI DAN LINDUNG

1. BKSDA Kalimantan Barat
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
3. UPTD KPH Kubu Raya
4. UPTD KPH Melawi
5. UPTD KPH Sekadau
6. UPTD KPH Ketapang Utara
7. UPTD KPH Landak
8. UPTD KPH Sanggau Barat

DINAS TERKAIT

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat
3. BPSKL Provinsi Kalimantan Barat
4. BPSPL Provinsi Kalimantan Barat

MITRA YPI

1. AKAR Foundation - Bengkulu
2. Juang Laut Lestari (JARI) - NTB
3. Yayasan Tananua - NTT
4. Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA) - Gorontalo
5. Tolitoli Labengki Giant Clam Conservation (TLGC) - Sulawesi Tenggara

DONOR

1. Trafigura Foundation
2. OAK Foundation
3. IWT
4. USFWS (U.S. Fish and Wildlife Service)
5. Mandai Nature
6. BAF (Blue Action Fund)
7. ICF (International Conservation Fund)
8. Packard Foundation
9. Greenboots
10. Pangolin Crisis Fund
11. OTP (One Tree Planted)
12. Full Circle Foundation
13. Rostock Zoo/EAZA (Silent Forest)
14. Otterfonds
15. LCAOF (Liz Claiborne Art Ortenberg Foundation)
16. MCF (Maritime Cluster Fund)
17. Darwin Extra
18. FCF (Forest Conservation Fund)
19. Cartier Foundation
20. Mulago
21. UK AID

